

**Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 4 Tahun 2010**

tentang

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Garut 2005 - 2025**



**Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2010**

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun
2005-2025

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab 1 Pendahuluan	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Pengertian.....	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 3
1.4 Dasar Hukum	I - 4
1.5 Proses Penyusunan.....	I - 7
1.6 Hubungan antara Kabupaten Garut dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 8
1.7 Sistematika Penulisan.....	I - 9
Bab 2 Kondisi Umum Daerah	II - 1
2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	II - 2
2.1.1 Penduduk.....	II - 3
2.1.2 Pendidikan	II - 4
2.1.3 Kesehatan.....	II - 4
2.1.4 Pemuda dan Olahraga.....	II - 5
2.1.5 Seni dan Budaya.....	II - 5
2.1.6 Agama.....	II - 6
2.1.7 Pengarustamaan Gender.....	II - 7
2.1.8 Penyandang Masalah Kesejahteraan	II - 7
2.1.9 Ketenagakerjaan.....	II - 8

2.2	Ekonomi.....	II - 9
2.2.1	Pertanian.....	II-10
2.2.2	Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	II-13
2.2.3	Sektor Industri Pengolahan.....	II-14
2.2.4	Sektor Pariwisata	II-14
2.2.5	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan BMT	II-16
2.3	Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	II-17
2.4	Infrastruktur Wilayah	II-18
2.5	Politik, Hukum dan Ketertiban.....	II-23
2.6	Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan.....	II-25
2.7	Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	II-30
2.8	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	II-32
Bab 3	Analisis Isu-isu Strategis	III-1
3.1	Tantangan.....	III-1
3.1.1	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	III-1
3.1.2	Ekonomi	III-5
3.1.3	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).....	III-10
3.1.4	Infrastruktur Wilayah	III-10
3.1.5	Politik, Hukum dan Ketertiban masyarakat	III-11
3.1.6	Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	III-13
3.1.7	Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	III-14
3.1.8	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	III-14
3.2	Modal Dasar.....	III-15
3.3	Isu Strategis.....	III-17
Bab 4	Visi dan Misi Pembangunan Daerah	IV-1
4.1	Visi Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Misi Pembangunan Daerah	IV-3
4.3	Perwujudan Visi dan Misi	IV-4

Bab 5	Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	V - 1
5.1	Tujuan Pembangunan	V - 1
5.2	Arah Pembangunan	V - 7
5.2.1	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, dan berwawasan ilmu dan teknologi	V - 7
5.2.2	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	V - 9
5.2.3	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang	V - 10
5.2.4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan	V - 10
5.3	Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang	V - 12
5.3.1	RPJMD Ke-1 (2005 - 2009)	V-12
5.3.2	RPJMD Ke-2 (2010 - 2014)	V-16
5.3.3	RPJMD Ke-3 (2015 - 2019)	V-20
5.3.4	RPJMD Ke-4 (2020 - 2024)	V-22
Bab 6	Penutup	VI-1
Lampiran 1	Matriks Keterkaitan Arah dan Tahapan Kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025	
Lampiran 2	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2008 dan Proyeksi Tahun 2009-2025 (Asumsi Inflasi 2010-2025 sebesar 6 persen)	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan IP 2008 Antara Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat	II - 2
Tabel 2.2 Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Tahun 2000-2008	II-10
Tabel 2.3 Data Potensi Industri Kabupaten Garut Tahun 2007 – 2008	II-14
Tabel 2.4 Satuan Kawasan Wisata di Kabupaten Garut.....	II-15
Tabel 2.5 Kontribusi Penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) Usaha Menurut	II-17
Tabel 2.6 Pos Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2004.....	II-28
Tabel 2.7 Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara di Kabupaten Garut.....	II-34
Tabel 2.8 Kegiatan Panas Bumi di Kabupaten Garut	II-35
Tabel 2.9 Potensi Pengembangan Energi Panas Bumi	II-37
Tabel 5.1 Key Performance Indikator dalam rangka Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Maju, Sehat, Berbudaya, serta Berwawasan Ilmu dan Teknologi	V - 3
Tabel 5.2 Key Performance Indikator Pembangunan Perekonomian Daerah	V - 4
Tabel 5.3 Key Performance Indikator Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	V - 5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJP Kab. Garut 2005-2025 I-8
Gambar 1.2	Keterkaitan RJPJ dengan Dokumen lainnya I-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Garut sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950). Sejak terbentuknya Kabupaten Garut, pembangunan telah dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Garut. Pembangunan di Kabupaten Garut diwarnai dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi dan politik, berbagai pembangunan tersebut telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam pelaksanaannya membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan karakteristik partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa suatu perencanaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan potensi sumber daya, keterbatasan dan kendala secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, pola perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dilandasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan menyusun perencanaan jangka panjang (duapuluh tahun), jangka menengah (lima tahunan), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-

cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pemerintah memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs), yang terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Daerah yaitu: "DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA". Perwujudan visi pembangunan daerah tersebut dilakukan melalui lima misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Berdasarkan kebutuhan dan mengacu pada ketentuan undang-undang, Pemerintah Kabupaten Garut menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.

1.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 serta RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008.

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud:

1. untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan

cita-cita dan tujuan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta visi dan misi Kabupaten Garut;

2. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut;
3. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut;

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksana pembangunan;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
7. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara bertahap.

1.4 Dasar Hukum

Landasan idiil dari RPJPD Kabupaten Garut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

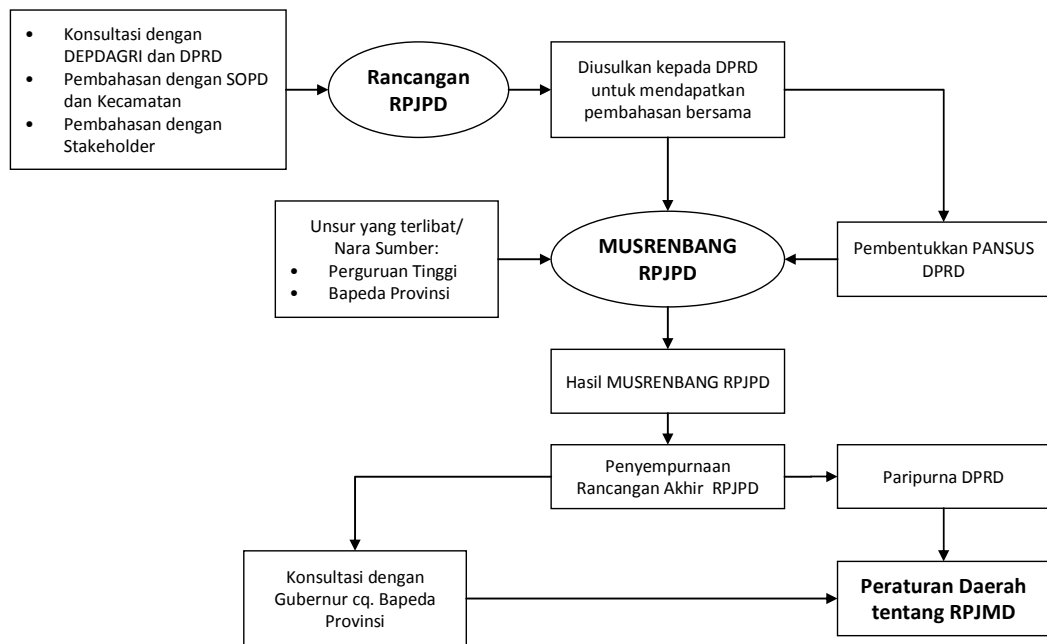
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

1.5 Proses Penyusunan

RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 disusun dengan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah (*top down*) serta bawah-atas (*bottom up*), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

Adapun proses penyusunan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pertama : **Penyiapan Rancangan Awal RPJPD**, kegiatan ini dilaksanakan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah 20 tahun ke depan melalui penjangkauan aspirasi masyarakat, yang melibatkan unsur pelaku pembangunan daerah (*stakeholder*);
- Kedua : **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah**, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap rancangan awal RPJPD;
- Ketiga : **Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD**, dilaksanakan untuk mengakomodir seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD, menjadi rancangan akhir RPJPD guna disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025;
- Keempat : **Penetapan Peraturan Daerah** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.



Gambar 1.1

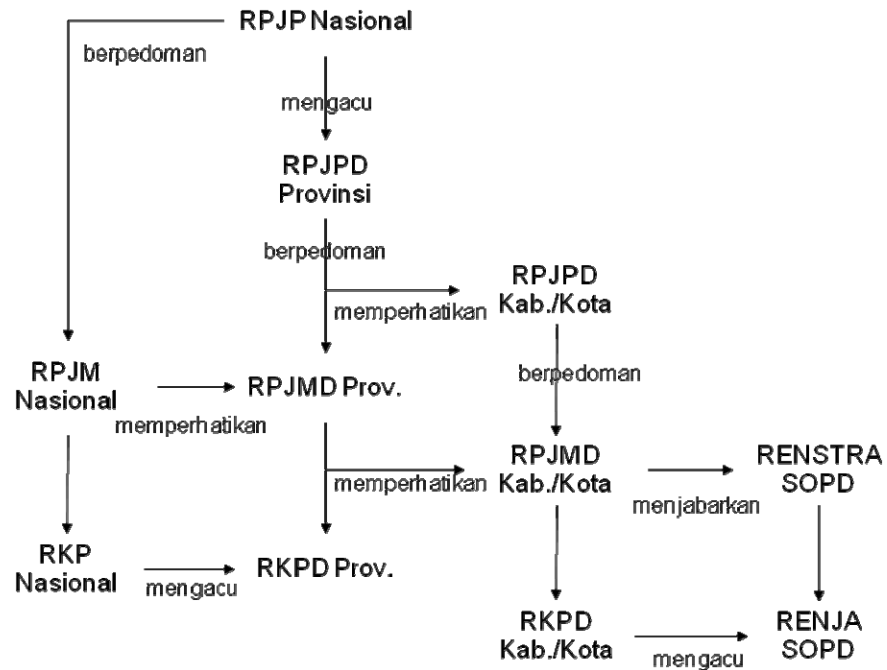
Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025

1.6 Hubungan RPJPD Kabupaten Garut dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan dokumen perencanaan lainnya dengan RPJPD Kabupaten Garut, dengan mengacu pada pada pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5, adalah sebagai berikut:

1. RPJP Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Jawa Barat.
2. Memperhatikan tujuan dibentuknya daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Dokumen RPJPD menghasilkan dokumen turunan sebagai berikut:
 - a. RPJMD Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional;
 - b. Rencana Strategis Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra-SOPD), yang merupakan penjabaran dari RPJMD serta memuat visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan SOPD dengan mempertimbangkan Renstra SKPD Propinsi maupun Renstra SOPD/ Kementerian Pusat;

- c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Gambar 2.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJP Kabupaten Garut disajikan dalam 6 (enam) bab, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan, proses penyusunan, keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bab II : Kondisi Umum Daerah

Berisi tentang kondisi saat ini, yang menggambarkan tentang potensi dan permasalahannya.

Bab III : Analisis Isu-isu Strategis

Bab ini berisi tantangan pembangunan daerah, modal dasar dan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut 20 tahun kedepan.

Bab IV : Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Berisi tentang visi, misi Kabupaten Garut dan visi, misi pembangunan daerah Kabupaten Garut untuk 20 tahun mendatang.

Bab V : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Bab ini berisi arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Bab VI : Penutup

Bab ini memuat tentang penutup dan rekomendasi-rekomendasi atas penyusunan RPJPD Kabupaten Garut.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur dengan luas sebesar 306.519 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Garut memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Karakteristik topografi Kabupaten Garut beragam, daerah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam dan di beberapa tempat labil. Kabupaten Garut memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, dan hari hujan yang banyak serta lahan yang subur menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian, serta ditunjang dengan terdapatnya 34 aliran sungai ke Utara, dan 19 aliran sungai ke Selatan,

Dinamika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional telah menunjukkan pertumbuhan yang positif pada berbagai bidang yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, masih ditemui berbagai masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya, serta kebutuhan yang semakin kompleks. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan di masa kini dan masa depan

diperlukan konsep perencanaan berdimensi jangka panjang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan berpijak pada kondisi saat ini sebagai modal dasar yang dimiliki untuk menentukan keberhasilan di masa mendatang.

2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Kondisi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama tercermin pada kuantitas penduduk dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat kondisi tersebut ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada Tahun 2008, IPM Kabupaten Garut telah mencapai angka 70,52 poin, dengan Indeks Pendidikan 81,71 poin; Indeks Kesehatan 66,33 poin; dan Indeks Daya Beli 63,54 poin.

Namun demikian, dibandingkan dengan pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat, kondisi IPM Kabupaten Garut sampai Tahun 2008 masih terpaut 0,60 poin dibawah IPM Jawa Barat.

Tabel 2.1
Perbandingan IPM 2008
Antara Kab. Garut dengan Prop. Jawa Barat

Komponen (1)	Garut	Jawa Barat
1. AHH (Tahun)	64,80	67,80
Indeks harapan hidup	66,33	71,33
2. AMH (Persen)	98,89	95,53
3. RLS (Tahun)	7,10	7,50
Indeks pendidikan	81,71	80,35
4. PPP (Ribu Rp)	634,95	626,81
Indeks Daya Beli	63,54	61,66
IPM	70,52	71,12

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Indikator Makro 2009.

2.1.1 Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut sampai tahun 2008 tercatat sebanyak 2.345.108 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.192.201 jiwa dan perempuan sebanyak 1.152.907 jiwa. Dengan luas wilayah 3.065,19 Km², tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2008 mencapai rata-rata sebesar 765,08 jiwa/ km². Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,53%. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dapat dihitung Rasio Beban Ketergantungan penduduk Kabupaten Garut adalah 61,05 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk menanggung 61 orang yang meliputi 53 orang anak-anak dan 8 orang usia lanjut.

Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan terakhir, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, sampai dengan tahun 2008 prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, adalah memiliki izasah/STTB SD/MI/ sederajat sebanyak 39,83%. Selanjutnya dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak tenaga kerja yaitu sebanyak 32,57%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 27,75%, sektor industri pengolahan sebanyak 14,71% dan sektor jasa sebanyak 13,04%.

Penduduk Miskin di Kabupaten Garut berdasarkan hasil pendataan BPS pada tahun 2008 diestimasikan sebesar 18,27%. Berdasarkan hasil PPLS08 yang dilaksanakan BPS pada tahun 2008, persentase rumahtangga miskin dan yang mendekati miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2008 relatif tinggi, yakni sebesar 35,86 persen, atau 221.010 RTS dari total sebesar 619.407 rumahtangga. Dengan komposisi 17,49 persen atau sebesar 108.309 rumah tangga yang mendekati miskin dan 18,19 persen rumah tangga miskin. Kecamatan yang memiliki persentase RTS tertinggi di Kabupaten Garut adalah Kecamatan Cibalong yang mencapai 47,74 persen, atau sebanyak 5.455 rumahtangga. Kemudian disusul oleh Kecamatan Peundeuy, Kersamanah dan Selaawi dengan prosentase RTS masing-masing sebesar 47,40; 46,21 dan 46,06 persen. Sedangkan kecamatan yang tampak memiliki persentase RTS terkecil adalah kecamatan Pasirwangi dan Cikajang dengan persentase masing-masing sebesar 26,13 dan 26,44 persen. Kemudian disusul oleh

Kecamatan Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul, dengan persentase RTS masing-masing sebesar 27,17 dan 30,22 persen.

2.1.2 Pendidikan

Indeks Pendidikan Kabupaten Garut pada tahun 2008 adalah 81,70 point dengan nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 7,1 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,89%. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 97.95 %. Kondisi bidang pendidikan juga memperlihatkan bahwa angka putus sekolah (APTS) tertinggi terdapat pada jenjang SLTP yaitu sebesar 36,83.

Apabila ditinjau dari jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah siswa, maka rasio jumlah guru dan murid pada tahun 2008 yaitu Rasio guru terhadap murid untuk jenjang TK sebanyak 1 orang guru berbanding 12 murid TK, Rasio terhadap murid SD sebanyak 1 guru berbanding 30 murid, Untuk SMP sebanyak 1 guru berbanding 15 murid, untuk SMA sebanyak 1 guru berbanding 12 murid, dan untuk SMK sebanyak 1 guru berbanding 12 murid.

2.1.3 Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, pada tahun 2008 Kabupaten Garut memiliki indeks kesehatan sebesar 66.33 point dengan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya 64,8 tahun dan Angka Kematian bayi (AKB) 52,42 (angka sementara) yang berarti masih ada sekitar 52 kematian bayi di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Rasio penduduk terhadap puskesmas dan balai pengobatan pada tahun 2008 yaitu 4.968 orang/unit, yang berarti satu unit puskesmas atau balai pengobatan rata-rata memberikan pelayanan kepada sekitar 4.968 penduduk. Adapun rasio tenaga kesehatan pada tahun yang sama adalah yaitu 1.174 orang/tenaga kesehatan. Selanjutnya, untuk apotik/toko obat pada kurun waktu yang sama memiliki rasio yaitu 20.392 orang/unit.

2.1.4 Pemuda dan Olahraga

Jumlah pemuda di Kabupaten Garut pada tahun 2008 (usia 15-34 tahun) sebanyak 827.842 jiwa atau 35,30% dari jumlah penduduk. Selain potensi pemuda secara kuantitas, Kabupaten Garut juga memiliki potensi lain yaitu organisasi kepemudaan sebagai wahana dalam mengembangkan bakat dan kemampuan generasi muda. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat potensial untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. Nantinya, kader-kader yang handal ini akan sangat dibutuhkan kontribusinya dalam pembangunan Kabupaten Garut.

Sementara itu, dalam pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu serta pembinaan terhadap atlet potensial.

Selanjutnya pembangunan sarana prasarana olahraga di Kabupaten Garut sangat variatif, dengan mengupayakan pengadaan sarana olahraga sesuai dengan hegemoni masyarakat dan sebagai sarana pembangkitan kreativitas masyarakat dalam bidang ekonomi. Namun sampai saat ini Kabupaten Garut belum memiliki sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.

2.1.5 Seni dan Budaya

Pembangunan seni dan budaya yang merupakan cerminan peradaban manusia di Kabupaten Garut ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan

sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana.

Pembangunan seni dan budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Untuk itu keberadaan seni tradisional dan upacara adat istiadat khas Garut perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai potensi daya tarik wisata seni dan budaya Kabupaten Garut. Namun demikian, upaya peningkatan jati diri masyarakat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

2.1.6 Agama

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan, antara lain ditandai dengan semakin bertambahnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sarana pendidikan keagamaan, meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dan senantiasa terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, intern umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sadaqoh (ZIS), hibah/ wakaf dan dana keagamaan lainnya. Walaupun masih belum optimal, namun hal itu cukup mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembiayaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan beragama, maka pembangunan kedepan perlu didukung dengan kebijakan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama dalam bermasyarakat. Karakteristik masyarakat Kabupaten Garut merupakan pencerminan masyarakat yang religius dan berbudaya luhur.

2.1.7 Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap berupaya untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik Sosial, Profesi maupun Kemasyarakatan serta Keagamaan, diantaranya: Gabungan Organisasi Wanita, Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDDI). Selain itu, terdapat Organisasi Wanita di Bidang Kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Organisasi Wanita Profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Wanita Muhammadiyah dan Perempuan Persis. Upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.

2.1.8 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Prosentasi penduduk miskin di Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2008 masih tinggi yaitu 18,27 % (Angka sementara BPS). Sementara itu Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat sampai tahun 2008 diindikasikan diantaranya oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan proporsi terbesar diantaranya Fakir miskin sebanyak 14,38%, Keluarga berumah tidak layak huni sebanyak 16,52% dan Keluarga bermasalah sosial psikologis sebanyak 17,17%.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas tentunya upaya untuk meningkatkan penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemulihan PMKS untuk kembali berperan dan berfungsi di masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya. Sampai tahun 2008, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Panti asuhan sebanyak 26 buah dengan penghuni sebanyak 847 orang, panti sosial lanjut usia (jompo) sebanyak 2 buah dengan jumlah penghuni 91 orang, Panti Sosial

penyanggah cacat seba.;,nyak 3 buah dengan jumlah penghuni 60 orang serta Karang Taruna sebanyak 423 buah.

2.1.9 Ketenagakerjaan

Dalam bidang ketenagakerjaan, penduduk yang masuk dalam usia kerja yaitu kelompok usia di atas 10 tahun adalah sebanyak 1.822.092 orang, Dari jumlah usia kerja tersebut lebih dari separuhnya atau 55,34 persen masuk kedalam angkatan kerja, sedangkan kegiatan sekolah sebesar 19,47 persen dan kegiatan lainnya sebesar 6,03 persen. Dari angkatan kerja tersebut komposisi laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 68,49 persen dan 31,51 persen. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga. Jumlah penganggur dari angkatan kerja tersebut yaitu sebesar 10.11%.

Struktur angkatan kerja di Kabupaten Garut menurut tingkat pendidikan masih tampak relatif rendah, dimana angkatan kerja masih didominasi pada jenjang pendidikan lulusan SD dan sederajat. Dari sebanyak 990.942 orang angkatan kerja pada tahun 2008 di Kabupaten Garut, tercatat sebanyak 715.657 orang atau sekitar 72,22 persen diantaranya adalah berpendidikan SLTP kebawah. Sedangkan yang berpendidikan SLTA keatas sebanyak 275.285 orang atau 27,78 persen.

Demikian pula dengan tingkat pengangguran, dimana didominasi oleh jenjang pendidikan lulusan SD, yakni sebesar 41.122 dari 100.202 penganggur atau sekitar 41,04 persen. Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi tingkat pendidikan ternyata semakin rendah tingkat penganggurannya, hal tersebut terlihat dari jumlah penganggur pada angkatan kerja yang berpendidikan lulusan DIII ke atas sebanyak 1.323 orang atau persentasenya paling rendah, yaitu sekitar 4,34 persen dari total angkatan kerja pada jenjang pendidikan yang sama.

2.2 Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Garut secara kuantitatif digambarkan melalui prosentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampai dengan tahun 2008, perekonomian Kabupaten Garut masih diberi warna yang dominan oleh sektor pertanian, yakni dengan kontribusi pembentukan nilai tambah sebesar 47,14% terhadap PDRB, disusul oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,89%, sementara kontribusi dari sektor lainnya dibawah 10%. Hal ini dapat dipahami karena sektor pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana, merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini.

Tetapi apabila ditelaah lebih dalam, kontribusi nilai tambah di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2004-2009, dimana semula sebesar 50,70 persen ditahun 2004, menurun menjadi 45,63 persen selama kurun waktu 4 tahun. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selain penciptaan nilai tambah di sektor lain yang lebih cepat, terutama pada sektor industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman.

Apabila sektor-sektor perekonomian dikelompokkan menjadi tiga kelompok (primer, sekunder dan tersier), maka akan terlihat adanya fenomena umum, yakni pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Garut selama periode 2004-2009 dari primer ke arah sekunder dan tersier yang menggambarkan semakin modernnya perekonomian di Kabupaten Garut. Kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonomi makro, yang diungkapkan oleh A.G.B. Fisher, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk di suatu wilayah, maka perekonomian akan bergeser dari primer ke sekunder. Meskipun dari sisi nilai NTB sektor primer masih mendominasi tetapi jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut pada tahun 2008 yang sebesar 4,69 persen, memperlihatkan sektor sekunder memiliki LPE yang lebih tinggi, sedangkan sektor primer mengalami perlambatan.

Pada tahun 2008 pendapatan perkapita Kabupaten Garut atas dasar harga berlaku diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 16,90% atau dari semula Rp 7.669.678 menjadi Rp 8.965.603, namun daya beli masyarakat secara riil diproyeksikan hanya meningkat sebesar 3,21% yang tercermin dari peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan.

Tabel 2.2

Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Tahun 2000-2008 (Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku (Rp)	Kenaikan (%)	Harga Konstan (Rp)	Kenaikan (%)
2000	3.538.847		3.538.847	
2001	3.937.065	11,25	3.603.168	1,82
2002	4.336.308	10,14	3.684.100	2,25
2003	4.617.847	6,49	3.723.688	1,07
2004	5.137.426	11,25	3.819.318	2,57
2005	6.117.609	19,08	3.916.058	2,53
2006*	6.984.822	14,18	4.012.710	2,47
2007**	7.669.678	9,80	4.140.288	3,18
2008**	8.965.603	16,90	4.273.230	3,21

Sumber BPS Kab. Garut, Januari 2009

2.2.1 Sektor Pertanian

Sebagai sektor paling dominan dalam struktur perekonomian kabupaten Garut, subsektor pertanian sebagai penyumbang terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan, namun demikian, apabila dicermati lebih mendalam, kontribusi nilai tambah di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan selama periode 2004-2009. Menurunnya peran sektor pertanian terhadap ekonomi, disamping karena terjadinya pergeseran struktur ekonomi, dimana kegiatan ekonomi masyarakat mengalami transisi dari sektor primer ke sekunder/tersier, juga diakibatkan bertambahnya jumlah dan variasi keahlian penduduk, disamping luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Selain itu, dengan intensifikasi yang minim, lahan yang dikelola oleh para petani kita masih sangat minim dan cenderung

mengarah pada petani gurem yang mencapai sebesar 80,1% pada tahun 2003. Kondisi inilah yang menyebabkan pergeseran perekonomian Kabupaten Garut ke arah sektor-sektor non primer.

Sektor Pertanian secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan), disamping itu memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 32,57% dari jumlah penduduk bekerja. Beberapa produk pertanian Kabupaten Garut yang dikategorikan sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a) Agribisnis Tanaman Pangan Unggulan, meliputi Padi Sawah, Jagung, Kedelai;
- b) Agribisnis Tanaman Sayuran Unggulan, meliputi Kentang Cabe Merah, Tomat;
- c) Agribisnis Tanaman Buah-buahan Unggulan yaitu Jeruk Keprok/Siam Garut;
- d) Agribisnis Tanaman Perkebunan Unggulan meliputi, Akar Wangi, Aren, Teh, Tembakau;
- e) Agribisnis Peternakan Unggulan, meliputi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong, Domba, Produksi Daging, Produksi Susu, Produksi Kulit Ternak;
- f) Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan, meliputi komoditas perikanan darat berupa ikan mas, nilam dan nila serta potensi perikanan laut berupa budidaya rumput laut, budidaya tambak udang dan perikanan tangkap.

Secara umum penduduk yang terlibat di sektor pertanian dapat dibedakan menjadi petani usaha dan petani buruh. Petani usaha mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian yang dijualnya sedangkan buruh tani mengandalkan pendapatannya dari upah yang dibayar oleh petani usaha. Dalam hubungan ini terlihat bahwa petani usaha memiliki resiko atas apa yang diusahakannya sedangkan buruh tani tidak memiliki resiko. Dalam hal pendapatan, petani usaha memiliki pendapatan yang fluktuatif sesuai hasil dan harga yang diterimanya, sedangkan buruh tani cenderung stabil pada kisaran angka tertentu. Pendapatan usaha tani sangat dipengaruhi oleh dua faktor,

yaitu hasil pertaniannya dan harga atas hasil pertaniannya. Hasil pertanian cenderung dipengaruhi oleh faktor internal petani, sedangkan harga hasil pertanian dipengaruhi oleh faktor eksternal petani. Dari dua faktor di atas yang sangat mempengaruhi kesejahteraan petani adalah faktor harga hasil pertanian.

Untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan salah satu indikator yang dipergunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai NTP di atas 100, maka semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Indeks harga yang dibayar petani mencerminkan perkembangan harga atas barang-barang kebutuhan petani meliputi konsumsi rumah tangga, biaya produksi usaha pertanian dan penambahan barang modal. Secara umum Nilai Tukar Petani Kabupaten Garut pada tahun 2007 adalah 117,66 Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan harga produk pertanian hanya sedikit lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga kebutuhan petani.

Potensi lain dalam sektor pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Secara umum, walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga

perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.

2.2.2 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Garut ditopang oleh 17 buah pasar kabupaten (tradisional), 32 pasar modern dan 3 unit STA (Sub Terminal Agribisnis) yang berada di Kec. Bayongbong, Kec. Cikajang dan Kec. Mekarmukti. Dilihat dari klasifikasi pedagang berdasarkan golongan, baik kecil, menengah maupun besar pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 2,85% yakni dari 14.667 pedagang pada tahun 2007 menjadi 15.529 pedagang pada tahun 2008. Sementara itu jumlah agen/grosir mengalami peningkatan sebesar 7,98%. Sementara itu, perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak, kerajinan dari akarwangi, vanili dan kain sutera dengan negara tujuan ekspor yaitu: USA, Inggris, Belanda, Rusia, Mesir, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, India, Korea, Kanada, Jerman Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Nilai ekspor tahun 2008 mencapai US\$ 18.354.212,60 meningkat sebesar 2,7% dari tahun 2007 sebesar US\$ 17.863.766,68.

Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi pula oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran kemudian disusul oleh subsektor hotel dan restoran. Pada dasarnya, subsektor hotel dan restoran di Kabupaten Garut merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan lebih jauh, karena banyak obyek dan daya tarik pariwisata di Garut yang dapat dikembangkan sampai pada skala nasional, atau bahkan sampai skala internasional.

2.2.3 Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri dan pengolahan pada tahun 2008 mencapai 7,63%. Meskipun kontribusi sektor ini masih kecil tapi jika dilihat perkembangannya melalui nilai LPE, sektor ini memiliki kinerja tertinggi di banding sektor lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecepatan sektor industri pengolahan dalam pembentukan nilai tambah dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat menggeser struktur ekonomi di wilayah Garut.

Tabel 2.3

Data Potensi Industri Kabupaten Garut Tahun 2007 – 2008

NO	URAIAN	TAHUN		Ket	Perkem- bangan (%)
		2007	2008		
1.	INDUSTRI AGRO & HASIL HUTAN				
	- Unit Usaha	8.588	9.106	Unit	6,0%
	- Tenaga Kerja	36.692	37.553	Orang	2,3%
	- Investasi	10.212.000	16.409.776	Juta	60,7%
	- Nilai Produksi	300.283.000	418.016.933	Juta	39,2%
2.	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT & ANEKA				
	- Unit Usaha	1.011	1.023	Unit	1,2%
	- Tenaga Kerja	9.179	9.735	Orang	6,1%
	- Investasi	14.388.594	14.473.000	Juta	0,6%
	- Nilai Produksi	156.554.000	169.438.236	Juta	8,2%
3.	INDUSTRI LOGAM & BAHAN BANGUNAN				
	- Unit Usaha	1.763	1.847	Unit	4,8%
	- Tenaga Kerja	8.245	8.894	Orang	7,9%
	- Investasi	7.367.721	7.457.721	Juta	1,2%
	- Nilai Produksi	92.296.423	110.296.423	Juta	19,5%
4.	INDUSTRI KIMIA				
	- Unit Usaha	434	445	Unit	2,5%
	- Tenaga Kerja	2.377	2.425	Orang	2,0%
	- Investasi	34.977.000	40.079.710	Juta	14,6%
	- Nilai Produksi	85.807.918	85.807.918	Juta	0,0%

Sumber : Dinas Industri, perdagangan dan penanaman Modal Kab. Garut, 2008

2.2.4 Sektor Pariwisata

Penguatan struktur perekonomian daerah lainnya yang dapat menjadi fokus perhatian pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut adalah bidang pariwisata. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten dan daerah

tujuan wisata di Jawa Barat. Potensi Kabupaten Garut mencakup Alam, Seni Budaya, dan Minat Khusus. Potensi obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Garut cukup beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan yang tersebar di 42 Kecamatan. Adapun dilihat dari segi Produksi, potensi obyek dan daya tarik wisata berada pada sembilan satuan kawasan wisata yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu obyek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus yang seluruhnya berjumlah 35 buah.

Tabel 2.4

Satuan Kawasan Wisata di Kabupaten Garut

No	Satuan Kawasan Wisata (SKW)
1	SKW Cangkuang SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Cibiuk, Kadungora, Leles, dan Leuwigoong.
2	SKW Cipanas SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Banyuresmi, Garut Kota, Tarogong Kaler, dan Tarogong Kidul.
3	SKW Kawah Darajat SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Samarang dan Pasirwangi.
4	SKW Makam Godog SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Balubur Limbangan, Cibatu, Karangpawitan, Karangtengah, Kersamanah, Malangbong, Pangatikan, Selaawi, Sucinaraja, Sukawening, dan Wanaraja.
5	SKW Ngamplang SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Cilawu.
6	SKW Pameungpeuk SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, dan Cisompet.
7	SKW Papandayan SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Sukaesmi, Bayongbong, Cisarupan, Cigedug, Cikajang, Banjarwangi, Cihurip, Singajaya dan Peundeuy
8	SKW Rancabuaya SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Pamulihan, Pakenjeng, Bungbulang, Talegong, Cisewu, Caringin dan Mekarmukti.
9	SKW Sancang SKW ini terdiri dari kawasan Kecamatan Cibalong.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut

Keragaman alam dan budaya yang dimiliki tersebut merupakan modal dasar dalam pengembangan daya tarik wisata. Dalam rangka upaya pengembangan wilayah yang lebih merata peranan pariwisata menjadi sangat penting, mengingat panjangnya mata rantai kegiatan usaha kepariwisataan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi: biro perjalanan, pengangkutan, perhotelan, restoran pemandu wisata/ pramuwisata, kerajinan rakyat, kesenian daerah, pemeliharaan dan pengembangan obyek wisata. Rantai kegiatan pariwisata ini jelas akan membutuhkan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan cinderamata, bahan dan alat bangunan. Dengan demikian pengembangan sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya atau dengan kata lain sektor ini mempunyai imbas secara multisektoral, yang pada akhirnya diharapkan dengan pengelolaan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut. Keberhasilan program-program sektor kepariwisataan dari aspek keluaran makro antara lain terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan dari sebanyak 1.425.301 wisatawan pada tahun 2007 menjadi 1.597.126 wisatawan. Penyerapan tenaga kerjanya mengalami peningkatan 11,12 persen dari sebanyak 2.185 orang pada tahun 2007 menjadi 2.428 orang. Untuk pengembangan sektor pariwisata, kendala yang dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung.

2.2.5 Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dan BMT

Jumlah UKM pada tahun 2008 adalah 12.277 unit. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor UKM pada tahun 2008 sebanyak 29.386 orang. Pada usaha koperasi mencapai sebanyak 1200 unit pada tahun 2008 dengan jumlah anggota koperasi meningkat sebesar 0,14% yakni sebanyak 232.500 orang pada tahun 2008. Sementara perkembangan usaha BMT pada tahun 2008 mencapai 64 unit dengan jumlah anggota sebanyak 6.177 orang.

Kontribusi penciptaan NTB pada tahun 2008 untuk setiap skala usaha terhadap perekonomian memperlihatkan bahwa skala usaha kecil masih mendominasi daripada skala menengah dan besar.

Tabel 2.5

**Kontribusi Penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) Usaha Menurut
Skala Usaha di Kabupaten Garut Periode 2005-2007 (Persen)**

Tahun	Skala Usaha			Jumlah
	Kecil	Menengah	Besar	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2005	83.59	6.52	9.89	100,00
2006 *	83.57	5.94	10.49	100,00
2007 **	82.83	6.94	10.23	100,00

Catatan * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kendati demikian, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, dominasi yang sangat kental dari UKM tersebut menyebabkan kecepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut secara makro tampak sangat lamban.

2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam rangka meningkatkan daya saing serta kesejajaran dan kesetaraan dengan daerah-daerah lainnya dalam skala nasional, regional dan global, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadi sangat penting dan menentukan. Penguasaan IPTEK merupakan modal dasar bagi masyarakat untuk berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mengisi perkembangan yang terjadi serta dapat dijadikan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penguasaan masyarakat terhadap IPTEK dapat membantu dalam meningkatkan volume dan kualitas produksi komoditas andalan, sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar lokal, nasional, regional, dan global. Namun demikian, dalam kenyataannya ketersediaan teknologi yang dibutuhkan di Kabupaten Garut sampai saat ini masih belum memadai, baik berupa Teknologi Tepat Guna (TTG) maupun teknologi canggih. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan sebagian besar kalangan masyarakat, bahwa IPTEK itu mahal dan rumit. Akibatnya, sebagian besar proses produksi, baik barang maupun jasa, cenderung masih menggunakan teknologi tradisional yang sangat sederhana dengan pola *trial and error*.

Sementara itu, penguasaan masyarakat dan aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan pengetahuan dasar dan terapan masih belum berkembang secara signifikan. Kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian dan perencanaan masih banyak mengandalkan jasa konsultan profesional yang berdampak pada besarnya anggaran untuk kepentingan tersebut. Di sisi lain, pelaksanaan koordinasi antar SKPD melalui pemanfaatan teknologi Sistem jaringan informasi terpadu masih belum optimal, sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan lintas sektoral masih belum maksimal.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan IPTEK antara lain masih kurangnya prasarana yang menunjang perkembangan dan penggunaan IPTEK, masih rendahnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap produk IPTEK, masih rendahnya tingkat kemampuan aparatur pemerintahan dalam menggunakan produk IPTEK yang telah tersedia, dan masih rendahnya kemampuan daya beli untuk memiliki dan menguasai produk IPTEK.

2.4 Infrastruktur Wilayah

Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan perannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah. Aspek ketersediaan sarana dan prasarana daerah pada dasarnya diarahkan terhadap upaya untuk menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di kabupaten Garut. Masih kurangnya sarana dan prasarana daerah terutama sarana transportasi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di perdesaan, merupakan salah satu faktor penyebab Kabupaten Garut saat ini masih menjadi daerah tertinggal di Indonesia. Selain itu, masih terbatasnya prasarana transportasi, terutama jalan mengakibatkan rendahnya aksesibilitas antar wilayah dan masih adanya wilayah yang terisolir, sehingga menjadikannya sebagai wilayah yang tertinggal pula.

Sistem transportasi di Kabupaten Garut umumnya terdiri atas moda darat. Moda angkutan darat yang melayani pergerakan eksternal dan internal Kabupaten Garut adalah angkutan jalan yang dilayani oleh sistem jaringan jalan, yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer (jalan negara), kolektor primer

(jalan propinsi) dan lokal primer (jalan kabupaten dan jalan desa). Hingga saat ini total panjang jalan di Kabupaten Garut mencapai 4.750,59 km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 30,08 km, jalan propinsi sepanjang 282,68 km, jalan kabupaten sepanjang 828,76 km, dan jalan desa sepanjang 3.611 km. Jaringan jalan arteri primer (jalan negara) adalah jaringan Jalan Nagreg-Tasikmalaya yang melewati Limbangan dan Malangbong, sedangkan jaringan jalan sepanjang Pantai Selatan yang melewati Pameungpeuk merupakan jalan kolektor primer (jalan propinsi). Jalan kolektor primer (jalan propinsi) itu terbentang dari ruas jalan perbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang sampai Samudera Indonesia. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Garut mencapai 306 buah dengan total panjang jembatan 2.565,30 meter.

Masih tingginya kondisi jalan kabupaten dalam keadaan rusak berat yang mencapai 236,29 km atau sebesar 28,51% sampai dengan tahun 2008, hal ini disebabkan diantaranya adalah adanya beberapa ruas jalan yang tingkat kerusakannya tidak dapat ditangani dengan pemeliharaan rutin maupun periodik karena prosentase kerusakannya sudah sangat besar, selain itu pada beberapa ruas jalan lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST), sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan, serta keterbatasan sarana dan prasarana/ alat berat dalam penanganan jalan dan jembatan. Belum optimalnya sistem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan terutama di wilayah Selatan serta masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan menjadi salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam upaya penyediaan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kondisi infrastruktur transportasi darat seperti kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang, serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur

transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pencapaian hasil pembangunannya telah berkontribusi dalam meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten (luas areal di bawah 1.000 ha) menjadi 60% serta mengupayakan pengembangan infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Keberhasilan pembangunan aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi dititikberatkan pada:

- 1) Penyediaan air baku/ air bersih untuk masyarakat dan penelitian sumber daya air yang diindikasikan dengan peningkatan pembangunan instalasi air dan perencanaan pengukuran daerah irigasi.
- 2) Penanganan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi perdesaan yang diindikasikan meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk mengairi lahan pertanian dan terpeliharanya pola tanam.
- 3) Meningkatkan kapasitas mampu sungai dan terkendalinya luapan air/longsor, yang diindikasikan berfungsinya sarana dan prasarana air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air baku.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Garut yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Pelayanan irigasi sampai saat ini dipandang belum optimal, hal ini terlihat masih adanya 39.827,70 Ha areal sawah yang belum terlayani dengan air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, disamping menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya sungai karena sedimentasi yang tinggi. Gambaran pencapaian kinerjanya, dapat dilihat dari kondisi jaringan irigasi sepanjang tahun 2008, yaitu saluran daerah irigasi pemerintah dalam

kondisi baik 401 km atau meningkat 17,46% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 331 km, kondisi rusak ringan 62 km atau menurun 24,39% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 82 km, kondisi rusak berat 27 km atau menurun 64,94 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 77 km.

Sementara itu, saluran daerah irigasi desa berada dalam kondisi baik 2.456,58 km, atau meningkat 0,87% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 2.435,37 km. Kondisi rusak ringan 716,150 km, atau sama dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 716,150 km, kondisi rusak berat 1.635,26 km atau menurun 1,28% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang mencapai 1.656,48 km.

Berkenaan dengan Rencana Pembangunan Bendung Copong yang diperkirakan dapat mengairi daerah irigasi seluas 5.271 ha, sampai dengan tahun 2008, baru sampai tahap pembebasan lahan. Rencana jaringan irigasi itu mencakup areal pengembangan seluas 6.394 ha yang tersebar di sepuluh wilayah kecamatan yang airnya bersumber dari Sungai Cimanuk dan empat anak sungainya, yaitu Sungai Cibuyutan, Citameng, Citikey, dan Ciojar. Lebar bendung mencapai 60 meter, tinggi 4 meter, serta panjang saluran 103,24 meter. Pembangunan Bendung Copong memerlukan tanah sekitar 136 ha yang memanjang dari mulai Copong hingga Limbangan. Pembangunan Bendung Copong diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 200 miliar bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sebanyak Rp 79 miliar di antaranya untuk bangunan bendungan dan Rp 89 miliar untuk jaringan irigasi.

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi dilayani melalui jasa telepon kabel serta telekomunikasi bergerak (*selular*). Pengembangan jaringan Infrastruktur Komunikasi Telepon Nirkabel (infrastruktur tower komunikasi selular) yang dibangun operator telekomunikasi, semakin memperluas jangkauan layanan telepon selular sampai ke wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Garut. Pelayanan komunikasi lainnya yaitu jasa pos dilayani di oleh 19 unit kantor Pos. Dalam keragaman bentuk komunikasi yang terus berkembang, layanan pos masih

tetap diminati masyarakat. Sampai saat ini PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Garut menyediakan beberapa jasa layanan pos, diantaranya adalah layanan Surat Biasa, Surat Kilat Khusus, Wesel Pos, Pos Express, Express Mail Service, Paket Pos, Western Union, SOPP.

Dalam Bidang Perumahan dan Permukiman, sampai dengan tahun 2008 telah memberikan kontribusi dalam meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dipertanian dan perdesaan, meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan, meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatnya kondisi perumahan yang sehat dan layak huni. Beberapa capaian kondisi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, penanganan/pemeliharaan sarana air bersih baik di perdesaan maupun di perkotaan yang diindikasikan dengan pembangunan infrastruktur air bersih;
- 2) Data Rumah kumuh menunjukkan kebutuhan rumah kumuh untuk direhabilitasi atau peningkatan sebanyak 941.534 unit. Pada tahun 2008 peningkatan rumah kumuh menurun sebesar 23,68%, dari sebanyak 114 unit pada tahun 2007 menjadi 87 unit, sedangkan rehabilitasi rumah kumuh mengalami peningkatan sebesar 109,46%, dari jumlah 148 unit pada tahun 2007 menjadi 310 unit pada tahun 2008.
- 3) Cakupan Pelayanan air bersih di perdesaan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 1,44% pada tahun 2008 yaitu dari 1.041.029 jiwa pada tahun 2007 menjadi 1.059.029 jiwa pada tahun 2008, sedangkan untuk pelayanan air bersih perkotaan mengalami peningkatan sebesar 1,70% yaitu dari 823.659 jiwa menjadi 835.659 jiwa.

Sementara itu perkembangan pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Garut, sampai tahun 2008 cakupan pelayanan sebesar 22,71% (164.718 jiwa) dengan jumlah pelanggan sebanyak 24.228 SL, yang beroperasi di 11 kecamatan pada 94 desa/ kelurahan dengan areal pelayanan 1 cabang utama dengan 2 buah service point dan 11 unit IKK. Kapasitas produksi meliputi

kapasitas terpasang 510 liter/dtk dan kapasitas produksi mencapai 359 liter/dtk, dengan potensi penambahan sebesar 8.379 liter/detik. Masih rendahnya cakupan pelayanan PDAM Garut terutama disebabkan oleh luasnya wilayah administratif kabupaten, laju pertumbuhan penduduk, serta sebaran penduduk yang tidak terkonsentrasi pada satu wilayah, disamping masih terkendala oleh besarnya tingkat kehilangan air yang mencapai 28,14%.

Berkenaan dengan pelayanan persampahan, perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan menunjukkan perkembangan yang beragam, diantaranya sampai tahun 2008 Kapasitas sampah Kota Garut sebanyak 986 (m³/hari) dengan daya angkut sampah sebanyak 284,2 (m³/hari), kendaraan dinas sebanyak 36 unit dan Angkutan sebanyak sampah 25 unit.

2.5 Politik, Hukum dan Ketertiban

Dari sisi politik, Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk dan pemilih yang cukup banyak, memiliki kedudukan yang cukup menentukan dalam menjaga stabilitas politik di Jawa Barat. Karena itu pembangunan Bidang Politik yang salah satunya ditandai dari keberhasilan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Tahun 2008, sampai dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 secara langsung, menandakan proses demokrasi yang sedang berlangsung berjalan dengan baik dan mulai dapat diterima oleh seluruh stakeholders.

Capaian kinerja pembangunan bidang politik lainnya diantaranya semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi mereka yang ditandai dengan terlaksananya audiensi/penyampaian aspirasi masyarakat terhadap DPRD, serta rapat dengar pendapat, rapat internal pansus DPRD Kab. Garut pembahasan aspirasi masyarakat. Hal tersebut menandakan pemahaman dan kesadaran politik sudah cukup baik. Namun demikian dalam proses demokratisasi di Kabupaten Garut diperlukan pengembangan sistem akses dan kontrol penyampaian aspirasi masyarakat yang mampu berfungsi dalam menjembatani hubungan atas dan bawah

sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat yang cenderung bersifat terbuka dan komunal, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan dapat lebih baik lagi.

Kondisi penegakan hukum di Kabupaten Garut sudah berjalan dengan cukup baik, namun tentu saja masih memerlukan peningkatan, terutama dalam kerangka pencegahan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum. Langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum serta penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran serta budaya hukum dan tertib hukum;
- 2) Penyusunan dan Pengkajian Produk Hukum Daerah, dimana hasil yang dicapai pada tahun 2008 yaitu legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan berupa terbentuknya produk hukum meliputi 26 buah perda, 6 buah peraturan bupati, 248 buah keputusan bupati dan 8 buah perjanjian.
- 3) Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dimana hasil yang dicapai pada tahun 2008 adalah terlaksananya publikasi produk hukum yang meliputi 42 kecamatan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lembaga swadaya Masyarakat dan dunia pendidikan serta 1.550 buku produk hukum daerah, 77.142 lembar Keputusan Bupati, 305 Himpunan Perda, 40 buku Peraturan Perundangan Pusat.

Dari sisi keamanan dan ketertiban, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Garut hingga kini berada dalam kondisi yang kondusif untuk kelancaran berbagai aktivitas masyarakat. Meskipun pada pertengahan tahun 2007 terjadi unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut, bahkan sempat dikhawatirkan menimbulkan kerusuhan, namun dampaknya terhadap stabilitas daerah masih dapat dikendalikan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam jangka panjang, kunci penyelesaian berbagai konflik akan terletak pada upaya membangun sistem demokrasi berdasarkan hukum berkeadilan, yang memungkinkan partisipasi politik tumbuh secara

sehat, sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan secara demokratis, terbuka dan bermartabat. Selain itu diperlukan pengembangan kultur pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan, baik oleh lembaga formal maupun masyarakat. Dengan mengandalkan aturan hukum yang bersifat formal, yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan pemangku kepentingan di Kabupaten Garut.

Berbagai masalah gangguan keamanan dan kejahatan yang timbul sebagai akibat dari krisis multidimensi harus tetap dapat dikendalikan, dan ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, karena rasa aman di Kabupaten Garut merupakan kebutuhan bersama sehingga harus lebih mengedepankan peran serta masyarakat, meskipun secara keseluruhan penanganan masalah kriminalitas dan tindak kejahatan masih menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat melalui lembaga Kepolisian. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya tentu saja harus dapat menjaga dan mencegah peluang terjadinya konflik yang bernuansa pada disintegrasi sosial, sehingga masyarakat dalam beraktivitas dapat tetap terayomi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Garut perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan pemahaman HAM serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak kejahatan dengan Sistem Keamanan Swakarsa dan bela negara.

2.6 Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan

Selama periode tahun 2004-2009, Pemerintah Daerah telah melakukan restrukturisasi kelembagaan, penempatan sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengembangan kapasitas anggota legislatif. Peningkatan kinerja aparatur difokuskan pada perbaikan dalam pola pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan melalui dibentuknya kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang secara fungsional bertugas memberikan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebagai bagian dari perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Wilayah, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut struktur organisasi perangkat daerah kembali mengalami penataan ulang dengan jumlah SKPD terdiri dari 1 Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Wilayah, 18 Dinas, 6 Badan, 5 Kantor, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga tahun 2008, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Garut mencapai 20.271 orang, dengan komposisi dari segi kepangkatan dan golongan, meliputi golongan I sebanyak 346 atau sebesar 1,71%, golongan II sebanyak 4.749 orang atau sebesar 23,43%, golongan III sebanyak 5.792 atau sebesar 28,57% dan golongan IV sebanyak 9.384 orang atau sebesar 46,29%.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kinerja birokrasi antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, penataan regulasi dan peningkatan pengawasan. Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, antara lain tercermin dari masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum sesuai dengan aturan baik dalam pelayanan administratif maupun dalam pelayanan jasa dan pelayanan pengadaan barang/jasa.

Berkenaan dengan penerapan *e-government* pada instansi Pemerintah Daerah, *performance* yang cukup baik diperoleh dari dibidang Teknologi Informasi, yang tercermin dengan diraihnya penghargaan *Government Award* dan *The Most Favorite Website of The Year Award* Tingkat Nasional oleh situs *www.garut.go.id* pada kompetisi *BubuAward V.5 2007*. Sebagai pemenang kompetisi web nasional, Kabupaten Garut dapat dipandang sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi dan komitmen yang tinggi di bidang pengembangan telematika disamping itu dapat memperkenalkan potensi Garut ke dunia internasional seluas-luasnya.

Bidang pemerintahan dan pembangunan desa menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus selama periode 2004-2009. Fokus pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan desa adalah terselenggaranya pembangunan yang berbasis perdesaan disertai peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha dan berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif; lemahnya sumber daya modal usaha; terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang sempurna; serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha adalah ketimpangan distribusi kekayaan dan kecurangan praktek bisnis dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, secara substansial merupakan upaya strategis Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan era reformasi dengan berpijak pada kondisi yang terjadi. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Hal ini memberikan konsekuensi dan

membawa perubahan yang mendasar tidak hanya pada kehidupan sistem pemerintahan, tetapi juga di dalamnya terkandung konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar Daerah akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistim pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Sebagai gambaran mengenai pengelolaan dan pengembangan aset daerah Kabupaten Garut dari Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pos Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2004

No	Uraian	Saldo Awal 30-Nop-04	Saldo Akhir 31-Des-04
1	Tanah	94.523.126.026,00	98.802.605.826,00
2	Peralatan dan Mesin	89.124.870.384,00	96.853.470.384,00
3	Gedung dan Bangunan	110.285.033.917,00	110.285.033.917,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	106.736.103.091,00	106.736.103.091,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.371.121.182,00	6.402.241.182,00
	Jumlah	407.040.254.600,00	419.079.454.400,00

Selanjutnya daam pengelolaan dan pengembangan aset daerah, maka pemerintah daerah (Kepala Daerah) yang menjadi penanggung jawab utama pengelolaan aset daerah harus membangun Sistem Informasi Aset Daerah

yang sesuai dengan regulasi. Pakar manajemen aset Doli D. Siregar menyatakan bahwa filosofi dari manajemen aset adalah "*Optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return*". Yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan aset membutuhkan minimalisasi biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*), memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*) dan memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*). Selain memahami filosofinya, pengelola aset daerah harus memahami secara benar pengertian mengenai Barang Milik Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007. Prinsip dasar pemanfaatan barang daerah adalah tidak membebani APBD dari segi pemeliharaan dan penyerobotan oleh pihak lain, dan menciptakan sumber PAD yang signifikan.

Dalam Rencana Jangka Panjang Daerah ini, maka pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya manajemen aset dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Tahap yang pertama adalah Inventarisasi Aset. Terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodifikasi atau labelling, pengelompokan dan pembukuan.
- Tahapan kedua adalah Legal Audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal. Juga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.
- Tahapan Ketiga adalah Penilaian Aset. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

- Tahapan keempat adalah Optimalisasi Aset. Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang terkandung dalam aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- Tahapan yang kelima adalah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset sebagai wahana untuk pengawasan dan pengendalian aset. Melalui wahana tersebut transparansi dalam pengelolaan aset bisa terjamin. Sehingga setiap penanganan terhadap suatu aset bisa termonitor secara jelas. Mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya.

2.7 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Garut sebagai bagian dari struktur penataan ruang wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari kedudukan dan perannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik dalam lingkup Nasional maupun wilayah Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut termasuk ke dalam Kawasan Andalan Priangan Timur bersama dengan empat kabupaten/ kota lainnya. Kebijakan ini turut berpengaruh terhadap kondisi penataan ruang Kabupaten Garut yang lebih diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan konsepsi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut baik eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan yang dilintasi jalur tersebut karena adanya peningkatan aksesibilitas.

- 2) Adanya rencana pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan – Palimanan yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah bagian Utara Kabupaten Garut seperti Kecamatan Malangbong, Selaawi, dan Baluburlimbangan karena adanya peningkatan aksesibilitas.
- 3) Adanya rencana pengembangan pelabuhan samudera yang melayani angkutan barang untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat peran dan kedudukan Kabupaten Garut dalam Pengembangan Wilayah Propinsi Jawa Barat.
- 4) Adanya kebijakan penetapan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat akan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang secara luas di wilayah Kabupaten Garut. Tanggungjawab dan peran wilayah Kabupaten Garut untuk mendukung kebijakan tersebut adalah memantapkan sekitar 85% wilayahnya untuk kawasan berfungsi lindung.
- 5) Adanya rencana pengembangan kawasan andalan Priangan Timur di wilayah Propinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya telah membuka peluang bagi wilayah Kabupaten Garut untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan terutama agribisnis dan pariwisata.
- 6) Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) Keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam usaha memacu pembangunan wilayah Kabupaten Garut dengan memperhatikan implikasi keruangan yang didasarkan atas komplementari antar sektor-sektor yang terpilih dalam wilayah yang berbeda.
- 8) Keterkaitan antara kawasan yang berkembang pesat dan sektor-sektor pengembangan utama dengan kawasan yang terisolir dan tertinggal pertumbuhannya. Dimaksudkan agar terjadi penebaran dan penjalaran pertumbuhan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut.

Dalam kebijakan penataan ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut berdasarkan kajian evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2006, ditetapkan rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan wilayah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Kota Hirarki I yaitu Kota Garut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani wilayah kabupaten. Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), peran dan fungsi Kota Garut diarahkan sebagai :
 - a. Pusat administrasi pemerintahan kabupaten;
 - b. Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kabupaten;
 - c. Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten;
 - d. Pusat pelayanan transportasi regional;
 - e. Pusat pengolahan;
 - f. Pusat pendidikan tinggi.
2. Kota Hirarki II yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sub wilayah. Kota Orde II sebagai pusat pelayanan sub wilayah diarahkan di Kota Malangbong, Pamenungpeuk, Kadungora, Bungbulang, Cikajang, Caringin, dan Singajaya. Sebagai Sub Pusat Pelayanan Wilayah, peran dan fungsi kota-kota tersebut adalah:
 - a. Pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
 - b. Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kawasan;
 - c. Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan (beberapa kecamatan);
 - d. Pusat pelayanan transportasi skala kawasan/regional.
3. Kota Hirarki III yaitu kota kecamatan yang melayani wilayah hinterlandnya yaitu kota-kota kecamatan diluar kota hirarki I dan II. Peran dan fungsi kota kecamatan diarahkan sebagai :
 - a. Pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
 - b. Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kecamatan;
 - c. Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan;
 - d. Pusat pelayanan transportasi skala kecamatan.

2.8 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Kabupaten Garut memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan. Untuk meningkatkan

kapasitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, program rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan akan terus dikembangkan, serta perlindungan bagi sumberdaya alam yang masih dalam keadaan baik terus dilanjutkan.

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, Kabupaten Garut memiliki potensi sumber daya mineral dan energi yang cukup besar dan bervariasi, terdiri dari sumber daya air, panas bumi, mineral dan bahan tambang, serta energi baru dan terbarukan lainnya seperti mikrohidro, surya dan angin. Secara fisiologis di Kabupaten Garut terdapat banyak aktivitas vulkanisme dan tektonik yang berkembang secara dinamis, sehingga sangat dimungkinkan terdapatnya potensi endapan mineral, baik mineral logam, non logam maupun potensi panas bumi sebagai sumber energi alternatif. Berlangsungnya proses hidrotermal pada fasa akhir aktivitas vulkanik menyebabkan terjadinya pelapukan batuan dasar, sehingga membentuk endapan mineral yang tergolong ke dalam mineral industri seperti kaolin di Kecamatan Malangbong. Demikian pula aktivitas vulkanik lainnya menghasilkan endapan hasil erupsi gunung berapi seperti tuf, lapili, bongkahan andesit dan basal yang hasilnya dapat dimanfaatkan sekarang ini sebagai bahan galian C seperti yang terdapat di Gunung Guntur, begitu pula dengan endapan belerang yang terdapat di Gunung Papandayan dan Talaga Bodas. Sektor ini merupakan sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan mengingat masih banyaknya lokasi-lokasi potensial yang belum tereksplorasi. Potensi pertambangan lain yang dapat diidentifikasi mencakup emas, pasir besi, biji besi, batubara, batu templek, obsidian dan perlit, batu andesit, batu gamping, tanah liat, batu setengah permata, granit dan mangan.

Tabel.2.7

Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara di Kabupaten Garut

No	Jenis Mineral & Batubara	Lokasi (Kec)	Daerah Prospek
1	Emas dmp. 126.011 Kg (Terukur)	Pamulihan, Pakenjeng, Talegong Cisewu, Caringin, Banjarwangi, Cikajang, Peundeuy, Singajaya, Cibalong, Cisompet, Bungbulang, Mekarmukti, Wanaraja, Karangpawitan	Ciarinem, Cijahe, Cijaringao, Sukul, Pasirgaru
2	Pasir Besi 9.000.000 Ton (Terukur) 13.500000Ton(Terindikasi)	Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Caringin, Mekarmukti	Cimerak, Sayang heulang, Cibera, Citanggeuleuk, Cijayana, Ranca buaya
3	Bijih Besi 150.000.000 Ton Terhipotesa	Cibalong, Cikelet, Bungbulang, Caringin	Banyuasih, Ciawitali, Cileuleuy, Cikabunan
4	Belerang 360.000 Ton (Terukur)	Cisurupan, Wanaraja	Papandayan, Talagabodas
5	Batubara 1.000.000 Ton (Terindikasi)	Singajaya, Cibalong.	Girimukti, Dahu
6	Batu Templek 8.500.000 M3 (Terukur)	Cisewu, Caringin	Loa, Sukarame
7	Kaolin 8.721.336 M3 (Terukur)	Malangbong	Karaha, Citeras,
8	Obsidian Perlit 75.000.000 Ton (Terindikasi)	Pasir Wangi	G. Kiamis
9	Pasir & Sirtu 100.000.000 Ton 95.000.000 M3 Terindikasi	Tarogong Kaler, Samarang ,Leles	G. Guntur, Cikatomas Haruman
10	Batu Andesit 200.000.000 M3 (Terindikasi)	Cisewu, Cikajang, Pakenjeng	
11	Tanah Liat 100.000.000 M3 (Terindikasi)	Bayongbong	
12	Batugamping 800.000.000 M3 (Terindikasi)	Caringin	Cikabunan
13	Batu ½ permata 120.000 Ton (Terukur)	Caringin, Cisewu, Bungbulang Cisompet, Pameungpeuk Pakenjeng	G.Kencana, Cilubang Cipicung, Sinarjaya Kiarapayung, Tj. Jaya
14	Granit 15.000.000 M3 (Terukur)	Bungbulang	Gunamekar
15	Diatom 150.000 Ton (Terukur)	Cibatu	
16	Mangan 180.000 Ton (Terindikasi)	Cibalong, Cisompet	Cicuri, Jatisari
17	Tembaga 26.000.000 Ton terindikasi	Bungbulang, Caringin	

Sumber : Dinas SDAP Kab. Garut

Potensi sumberdaya mineral dan batu bara sebagai potensi lokal Kabupaten Garut sangat besar. Dan berdasarkan hasil eksplorasi maupun penelitian terbagi kedalam 3 (tiga) katagori sebagai berikut:

1. **Terukur** yaitu cadangan sumberdaya mineral yang sudah diketahui dengan pasti, baik kualitas, penyebaran, bentuk dan ukuran dalam jumlah

yang dimiliki, tingkat kepercayaan sebesar 80 – 85% dari seluruh cadangan yang ada sekitar (8 jenis mineral)

2. **Terindikasi** yaitu cadangan sumberdaya mineral yang telah diselidiki dengan tingkat keyakinan 50 – 65% dari total yang diindasikan (8 jenis mineral)
3. **Terhipotesa** yaitu cadangan sumberdaya mineral yang sudah diketahui batas penyebarannya dan ukuran suatu bentuk cadangannya dengan tingkat keyakinan perolehannya 20 – 30% dari cadangan terhipotesa

Tabel.2.8

Kegiatan Panas Bumi di Kabupaten Garut

No	Potensi	Kondisi Existing	Kegiatan				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Darajat	Eksplorasi (Dana Bagi Hasil)	DBH	DBH	DBH	DBH	DBH
2	Kamojang	Eksplorasi (Dana Bagi Hasil)	DBH	DBH	DBH	DBH	DBH
3	Karaha Bodas	Feasibility Study /AMDAL	FS/AMDAL	Eksplorasi	Eksplorasi	Eksplorasi	DBH
4	Papandayan	Penyelidikan Umum	Lelang	Eksplorasi	Eksplorasi	Eksplorasi	FS/AMDAL
5	G. Guntur Masigit	Resources	-	PU	Lelang	Eksplorasi	Eksplorasi s/d Th. 2015
6	Cilayu/ Arinem	Resources	PU	Lelang	Eksplorasi	Eksplorasi	Eksplorasi

Pemerintah Kabupaten Garut belum pernah memberikan izin pertambangan panas bumi sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 beserta turunannya (PP No. 59 Tahun 2007 dan Permen ESDM). Pengusahaan panas bumi yang sudah beroperasi yaitu di Darajat dan Kamojang, kontrak kerjasama dilaksanakan antara Pemerintah Pusat (PN. Pertamina berdasarkan PP No. 27 Tahun 1968, yang merupakan turunan dari UU No. 44 Prp Tahun 1960 Pasal 2 dan 3, serta Penjelasan Umum UU tersebut) dengan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd di Darajat dan PT. Pertamina Geothermal Energy di Kamojang. Sedangkan untuk pengusahaan panas bumi di G. Talaga Bodas yang lokasinya bergabung dengan G. Karaha di Kabupaten Tasikmalaya, sampai saat ini baru pengajuan AMDAL ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar untuk tahap eksploitasi.

Dalam kegiatan pertambangan tidak terlepas dari aktivitas penambangan, sehingga dalam pengendaliannya perlu dikeluarkan izin untuk perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan. Jumlah perusahaan pertambangan yang mempunyai izin pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan (KP) atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam pada tahun 2007 sebanyak 17 perusahaan sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 4 perusahaan. Sementara itu pada tahun 2008 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Eksploitasi mineral non logam sebanyak 13 Perusahaan jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2007 sebanyak 14 perusahaan. Pada tahun 2008 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP Eksploitasi mineral non logam sebanyak 6 perusahaan. dan sampai tahun 2009 perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan (IUP) Eksploitasi dengan skala besar. Sedangkan dari kegiatan usaha pertambangan eksploitasi sumberdaya mineral baik logam maupun non logam sampai tahun 2009 baru dapat menyerap tenaga kerja sekitar 3000 orang.

Pada sektor energi terutama mengenai kelistrikan, masih banyak daerah-daerah yang sampai saat ini belum tersentuh oleh fasilitas penerangan listrik terutama daerah-daerah Garut Selatan. Hal ini disebabkan kondisi topografi yang kurang memungkinkan dapat dijangkau oleh PLN. Di sisi lain, karena berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Garut mendapatkan penyinaran matahari yang relatif stabil sepanjang tahun dengan kondisi yang sedikit lebih tinggi pada musim kemarau, rata-rata potensi radiasi penyinaran matahari mencapai 4,82 kwh/m² merupakan alternatif energi listrik terutama pada daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Selain potensi energi tersebut, Kabupaten Garut juga memiliki potensi energi panas bumi cukup besar yang diperkirakan mencapai total 1045 Mwe. Sumber energi panas bumi dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai energi terbarukan, panas bumi dapat diandalkan sebagai pasokan jangka panjang. Disamping pembangkit tenaga listrik, energi ini dapat dimanfaatkan untuk pengeringan hasil pertanian, pengawetan hasil perikanan dan pariwisata. Pengusahaan komersial pemanfaatan secara langsung baru sebatas untuk

terapi dan rekreasi seperti di Cipanas, sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk pembangkit listrik baru dikembangkan di daerah Darajat. Hal ini tentu saja menjadikan peluang untuk pengembangan di masa mendatang.

Tabel 2.9
Potensi Pengembangan Energi Panas Bumi

No	Lokasi	Install PLTP (Mwe)	Energy Potensial					Total
			Resources (Sumber Daya)		Reserve (Cadangan)			
			Speculative	Hypothetic	Possible	Probable	Proven	
1	Cilayu	-	100	-	-	-	-	100
2	Ciarinem	-	25	-	-	-	-	25
3	G. Papandayan	-	225	-	-	-	-	225
4	G. Guntur Masigit	-	-	-	70	-	-	70
5	Darajat	125	-	-	-	70	280	350
6	G. Talaga Bodas	-	-	75	120	80	-	275
TOTAL		125	425		620			1045

Sumber : SDAP, 2005

Potensi pengembangan energi lainnya yaitu sumber daya air sungai Cibatarua kecamatan Pamulihan, Cirompang kecamatan Bungbulang dan Cimerak kecamatan Cibalong dengan kapasitas antara 19,57 kW- 277,5 kW.

Dari beberapa potensi tersebut, sudah dilakukan upaya penelitian yang diindikasikan dengan kegiatan eksplorasi sumber daya mineral dan energi oleh berbagai pihak, seperti Pemerintah Kabupaten Garut, Perusahaan-perusahaan swasta, instansi lainnya maupun oleh Pemerintah Kabupaten Garut sendiri. Bahkan di beberapa lokasi sudah dilaksanakan kegiatan eksploitasi untuk sumber daya mineral dan kegiatan pembangunan untuk mengembangkan potensi sumber daya energi, seperti panas bumi dan energi baru dan terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan energi panas bumi. Khusus di wilayah Garut Selatan, telah terindikasi adanya kandungan sumber daya mineral berupa emas, bijih besi dan pasir besi, dengan kandungan untuk bijih besi dan pasir besi Fe total 50% s/d 60%,

sementara itu untuk sumber daya panas bumi di Kabupaten Garut terdapat 6 (enam) lokasi manifestasi panas bumi. Khusus di Darajat, potensi panas bumi mencapai 350 MW. Sumber daya panas bumi tersebut sudah dikembangkan untuk tenaga listrik sebesar 225 MW. Potensi panas bumi ini sangat besar prospeknya untuk dikembangkan terutama bagi pembangkit listrik khususnya untuk keperluan industri.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program pembangunan listrik perdesaan telah mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini masih perlu dukungan dari berbagai pihak mengingat masih banyak penduduk di Kabupaten Garut yang belum menikmati listrik. Kegiatan yang memberikan kontribusi langsung pada peningkatan cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Garut, dari jumlah desa/Kelurahan sebanyak 424 Desa/Kelurahan di Kabupaten Garut, sampai tahun 2008 desa yang sudah menikmati aliran listrik sebanyak 420 Desa/Kelurahan, akan tetapi masih banyak kampung-kampung yang belum menikmati aliran listrik, dan yang sama sekali belum menikmati listrik sebanyak 4 desa yaitu Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong, Desa Sukawangi Kecamatan Cihurip, Desa Gunung Jampang Kecamatan Bungbulang dan Desa Karang Sewu Kecamatan Cisewu. Energi listrik yang tidak dikelola PLN yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2008 terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Khusus untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Kabupaten Garut mendapat bantuan sebanyak 1 unit dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat yang berada di Desa Karangsari Kecamatan Cikelet.

Berkenaan dengan pembangunan di bidang kehutanan diperoleh capaian kinerja yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan tertanganinya lahan kritis di Kabupaten Garut dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui GRLK. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dan sekaligus perbaikan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) hutan, merupakan kebijakan pemerintah mengenai

pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan atau sekitar hutan dalam rangka *social forestry* yang memberikan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan pada hutan lindung meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam pengelolaan Kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani, pelaksanaan hutan kemasyarakatan dilakukan dalam bentuk sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus melalui paradigma Forest Resource Management dan Community Based Forest Management yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang dalam implementasinya PHBM plus akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dengan kesadaran tanggungjawab sosial (*social responsibility*) yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju "Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari". Kebijakan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) dilaksanakan dalam bentuk sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan jenis bantuan natura berupa jamur kayu dan lebah madu melalui GRLK.

Sasaran pembangunan sub sektor kehutanan lainnya adalah memulihkan fungsi hutan sebagai wilayah konservasi dan terciptanya fungsi hidroorologis Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 adalah 107.865 Ha, sesuai dengan fungsinya yang terdiri dari 5.400 Ha kawasan hutan produksi terbatas, 166 Ha hutan produksi, 75.572 Ha kawasan hutan lindung, dan 26.727 Ha hutan Konservasi. Adapun berdasarkan Rencana Induk Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Barat Tahun 2006, up dating data lahan kritis di Kabupaten Garut yang didapatkan dari citra lansat adalah 59.255 ha yang terdiri dari lahan kritis di luar

kawasan hutan 45.433 ha dan di dalam kawasan hutan 13.822 ha. Keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan kritis tidak terlepas dari pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangannya. Dalam upaya penangan lahan kritis, Kabupaten Garut mempunyai 3 DAS, yaitu DAS Cimanuk, DAS Cilayu–Cikandang dan DAS Cikaengan–Cisanggiri.

DAS Cimanuk merupakan DAS prioritas nasional dalam penanganan lahan kritis karena merupakan salah satu DAS besar yang kritis di Jawa Barat, dimana Kabupaten Garut merupakan wilayah hulunya dan mengalir melalui Kabupaten Sumedang, Majalengka serta bermuara di Kabupaten Indramayu. Untuk menanggulangi kerusakan lingkungan, terutama di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) sebagai daerah tangkapan air, secara nasional, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN), serta Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), yang keduanya telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Diharapkan melalui kedua gerakan rehabilitasi tersebut, tingkat kerusakan hutan dan lahan kritis di Kabupaten Garut akan semakin berkurang, serta dieliminasi sampai tingkat yang minimal, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap pelestarian ekologis dan keberlanjutan pembangunan. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GRLK dan GN-RHL) dimaksudkan sebagai suatu kegiatan penanganan lahan kritis baik di luar kawasan hutan dengan menggunakan pola vegetatif (penanaman) dan sipil teknis (bangunan konservasi tanah dan air). Kegiatan GRLK dan GN-RHL dilaksanakan mulai tahun 2003, dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya yaitu penanaman lahan kritis, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan perkebunan. Penanganan lahan kritis pada lahan milik masyarakat di Kabupaten Garut dilaksanakan melalui kegiatan GN-RHL dan GRLK serta kegiatan lainnya.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kondisi daerah dalam kurun waktu dua puluh lima tahun ke depan, pembangunan akan menghadapi banyak tantangan atau isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian, pemikiran, dan solusi pemecahan. Permasalahan dan isu-isu strategis yang belum dapat diselesaikan, disebabkan belum teridentifikasinya masalah-masalah tersebut secara tepat. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan analisis isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3.1 Tantangan

3.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Kabupaten Garut sebagai akan menghadapi tantangan untuk mengendalikan pertumbuhan, persebaran, kualitas penduduk serta penyediaan kebutuhan bagi kehidupan penduduk di masa mendatang. Dalam dua puluh tahun mendatang, Kabupaten Garut menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi dengan perkiraan 3,03 juta jiwa. Pengendalian jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya. Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponen-komponennya, tantangan peningkatan IPM pada masa datang akan lebih terfokus pada peningkatan Indeks Kesehatan yang masih berada pada tingkat paling bawah dibandingkan pencapaian Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Barat. Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, disamping untuk terus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Perwujudan sektor pendidikan harus berkorelasi dengan sumberdaya manusia yang selain memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan juga memiliki komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat. Pendidikan di Kabupaten Garut hingga saat ini masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan mutu, sedangkan keberadaan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kondisi mutu sumber daya manusia (SDM). Dalam perspektif teori pembangunan, akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu terjadinya perubahan yang mengarah kepada perbaikan taraf hidup rakyat, apabila kondisi SDM kurang bermutu. Indikator utama mutu SDM adalah derajat kesehatan, kemampuan dan moralitasnya. Hal lain yang harus dijadikan landasan adalah bahwa masa depan berhubungan dengan pendidikan berkelanjutan bagi siapapun yang ingin kembali mempelajari perilaku dan kemampuan baru. Konsep ini mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya, pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi melalui pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal, peningkatan kualitas lulusan untuk mengantisipasi tingkat persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam hal pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal.

Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Memperhatikan hal tersebut,

pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, perlu juga didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang. Untuk mencapai keadaan tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan pembangunan yang diwujudkan bersama dengan masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan.

Prediksi jumlah angkatan kerja pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 966 ribu jiwa untuk usia 15 tahun keatas serta 1,09 juta jiwa untuk usia 10 tahun keatas dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 1,16 juta jiwa. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi akan semakin besar di masa mendatang.

Dalam hal pembangunan kepemudaan, potensi dan peluang yang dimiliki cukup besar, disamping kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi

dalam hal ini diantaranya pola pikir dan semangat yang tinggi. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya.

Seiring dengan kondisi aktual pembangunan keolahragaan saat ini, dirasa perlu mengembangkan institusi birokrasi pemerintahan di bidang keolahragaan guna memperhatikan sinergitas sistem pembinaan olahraga baik menyangkut olahraga pendidikan, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi. Di samping itu pengembangan ruang publik dan fasilitas olahraga agar bisa bertambah sehingga para pelajar dan masyarakat luas dapat terlayani secara baik untuk berolahraga. Demikian pula pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan demi kepentingan sentralisasi pembinaan maupun pentas olahraga nasional dan internasional secara terpadu perlu segera diwujudkan agar Kabupaten Garut dapat mengambil posisi menjadi kekuatan inti olahraga nasional. Oleh karena itu, pengembangan olahraga ke depan mesti ditangani secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya seiring dengan lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.

Stigma bahwa perempuan makhluk lemah, porsi perempuan di rumah, perempuan merupakan obyek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan. Karena itu, kesetaraan jender menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan jender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat (khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan jender.

Imbas perubahan global dan pertentangan antara nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, keurbakalaan dan permuseuman dengan arus perubahan teknologi informasi dan era komputerisasi, serta lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya diantaranya orientasi kelompok, agama, etnis, dan krisis jati diri karena dapat menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi; menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi yang diinginkan. Untuk itu upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keempat aspek kebudayaan tersebut, penerapan muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, serta revitalisasi terhadap lembaga/ organisasi kesenian dan kebudayaan pelestarian cagar dan desa budaya, dan pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan strategi yang optimal dalam pembangunan budaya daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial adalah beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial. Upaya yang harus dilakukan diantaranya pengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, pengelolaan yang profesional dan komprehensif panti rehabilitasi sosial. Selain itu, penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalian dan pendayagunaan potensi yang dimiliki, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/ optimalisasi bagi organisasi/ lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan budaya.

3.1.2 Ekonomi

Pesatnya pertumbuhan ekonomi membutuhkan teknologi tinggi untuk mempercepat produksi. Percepatan ini dipengaruhi oleh kecepatan transaksi, perumusan ide-ide baru dalam pergerakan ekonomi, aliran sumber daya, dan kecepatan data, informasi serta pengetahuan terhadap sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi Kabupaten Garut dua puluh tahun mendatang

dihadapkan pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2005–2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 4% sampai 7% per tahun. Struktur ekonomi ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan industri yang disertai pergeseran dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Tren ekonomi di masa yang akan datang akan bergantung pada pengetahuan, jaringan informasi akan menjadi jantung dari infrastruktur baru. Sistem ekonomi baru bergantung pada mobiltas komunikasi elektronik.

Karakteristik ekonomi beberapa tahun yang akan datang akan ditandai dengan persaingan ekonomi internasional secara besar-besaran, arah pertumbuhan bisnis global dan aliran sumber daya, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investor agar dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Garut. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor penentu untuk menarik investasi baru.

Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan

penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik maupun internasional.

Tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Kabupaten Garut difokuskan pada peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen.

Tantangan utama dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Garut adanya konversi lahan usaha tani ke nonpertanian menyebabkan terjadi konsentrasi kapital di nonpertanian yang semakin menekan posisi tawar sektor pertanian, rendahnya sumberdaya manusia di sektor pertanian akibat berkurangnya minat dan ketersediaan sekolah kejuruan serta pendidikan dan latihan (diklat) di bidang pertanian, rendahnya skala usaha tani, dan rendahnya penghargaan terhadap petani serta lemahnya akses petani terhadap teknologi baru, permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain pengembangan sarana dan prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian, peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarsubsistem dalam sistem pertanian, serta menumbuhkembangkan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan dan budaya pertanian. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif akan meningkat secara perlahan. Peningkatan ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun.

Bisnis kelautan di masa mendatang akan dihadapkan pada pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta

berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sehingga mampu mentransformasikan keunggulan komparatif sektor kelautan dan perikanan menjadi keunggulan bersaing.

Tantangan pengembangan pariwisata dua puluh tahun mendatang adalah mewujudkan Kabupaten Garut sebagai daerah kunjungan wisata utama. Potensi wisata Kabupaten Garut cukup banyak dengan objek dan atraksi wisata yang variatif dan menarik. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Garut, maka pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang berakar pada alam dan budaya daerah sehingga dapat mencerminkan jati diri masyarakat, yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata. Selain itu, promosi berbasis internet dinilai sangat efektif untuk beberapa puluh tahun ke depan.

Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Dalam bidang energi, tantangan dalam dua puluh tahun kedepan adalah terpenuhinya pasokan energi yang handal dan efisien, terciptanya pengelolaan energi yang berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan. Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi, diversifikasi energi, dan konservasi energi. Dalam upaya intensifikasi energi, maka eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi baru perlu terus dilakukan. Upaya diversifikasi energi dilakukan dengan mengembangkan berbagai energi alternatif baik energi baru maupun energi

terbarukan seperti mikro hidro, Biomassa, panas bumi, tenaga uap, tenaga surya, dan angin.

Dalam kebijakan ketenagalistrikan, khususnya dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan, energi air merupakan energi yang potensial lokal yang diarahkan pemanfaatannya untuk pelistrikan di daerah perdesaan atau daerah terpencil. PLTMH menjadi prioritas utama karena teknologi ini mampu memasok kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat di perdesaan dan juga melayani kebutuhan industri kecil perdesaan. Potensi energi surya dan angin menunjukkan bahwa energi ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan ketersediaan energi di perdesaan. Pada sektor energi terutama mengenai kelistrikan, potensi radiasi penyinaran matahari mencapai rata-rata $4,82 \text{ kwh/m}^2$ merupakan alternatif energi listrik terutama pada daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Selain itu, Kabupaten Garut juga memiliki potensi energi panas bumi cukup besar yang diperkirakan mencapai total 1045 MW. Sifatnya energi panas bumi yang berkelanjutan akan menjadikan energi ini terus tersedia selama kondisi lingkungan sekitarnya terjaga dan tentunya akan sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Disamping pembangkit tenaga listrik, energi ini dapat dimanfaatkan untuk pengeringan hasil pertanian, pengawetan hasil perikanan dan pariwisata. Pengusahaan komersial pemanfaatan secara langsung baru sebatas untuk terapi dan rekreasi seperti di Cipanas, sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk pembangkit listrik baru dikembangkan di daerah Darajat. Hal ini tentu saja menjadikan peluang untuk pengembangan di masa mendatang. Potensi pengembangan energi lainnya yaitu sumber daya air sungai Cibatarua kecamatan Pamulihan, Cirompang kecamatan Bungbulang dan Cimerak kecamatan Cibalong dengan kapasitas antara 19,57kW-277,5kW.

Di sektor rumah tangga, maka diversifikasi energi akan memerlukan pengembangan teknologi tidak hanya dalam penyediaan gas tetapi juga energi lainnya seperti biomassa. Kabupaten Garut memiliki potensi energi biomassa cukup besar. Pemanfaatan energi biomassa dapat disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing baik dengan biogas atau biofuel.

3.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perubahan datang secara bergelombang dan sangat cepat. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari keunggulan berdasarkan sumber daya yang dimiliki (*resource-based competitiveness*) menjadi keunggulan berdasarkan pengetahuan (*knowledge-based competitiveness*). Karena itu kemampuan suatu daerah untuk menguasai IPTEK menjadi salah satu faktor dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka peningkatan kemampuan IPTEK, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan IPTEK yang ditunjang oleh ketersediaan kualitas sumber daya IPTEK, diantaranya SDM yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pembangunan IPTEK mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat dipertanggungjawabkan, prima, inovatif dan berpandangan jauh ke depan.

3.1.4 Infrastruktur Wilayah

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Garut adalah meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan meliputi pengembangan angkutan umum massal terutama untuk daerah yang berpenduduk padat; pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien berupa jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal; pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif; pengembangan pelabuhan; pengembangan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersifat alami maupun buatan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan kekeringan; peningkatan layanan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi serta meningkatkan intensitas tanam padi sawah serta menjaga alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan; pengembangan jaringan telekomunikasi baik yang menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, terutama pada daerah yang teledensitasnya masih rendah; pengembangan sarana dan prasarana

dasar pemukiman, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dan sanitasi lingkungan serta pengembangan pengelolaan sampah yang berskala regional. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana wilayah antara lain dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta kemampuan lembaga pengelola.

3.1.5 Politik, Hukum dan Ketertiban masyarakat

Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat tingkat legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tolok ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi mediasi yang merupakan cerminan masyarakat madani (*civil society*) seperti jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi keterwakilan partai politik di lembaga legislatif; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tingkat partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dan tingkatan.

Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Kabupaten Garut, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan

bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui penguatan masyarakat madani (*civil society*) yang terbuka terhadap perubahan. Termasuk keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonom akan terus bermunculan selama aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir dengan tepat, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengalami hambatan.

Pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diukur berdasarkan orientasi pemerintah (*government orientation*) yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/ efisiensi yudisial. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas. Pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakkan hukum secara berkeadilan.

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan faktor utama yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut. Potensi ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat akan dihadapi dari friksi dan konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung

lahan, air, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Juga akibat dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

3.1.6 Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi, penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tantangan yang dihadapi sampai dengan 2025 diantaranya adalah masih rendahnya kinerja aparatur karena adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih rendahnya kualitas SDM aparatur, dan rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan daerah, kesisteman yang mampu menjadi acuan dalam proses administrasi pemerintahan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, dan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Birokrasi yang modern dan mampu menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi yang mampu memformulasikan kebijakan sesuai dengan keinginan politik dan aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggung jawab.

Aspek lain yang peting perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan 20 tahun kedepan adalah mengenai pengelolaan/ manajemen

keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Untuk itu, Pemerintah daerah harus membuat kebijakan pengelolaan aset yang dapat dipertanggung jawabkan. Manajemen aset adalah metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atas aset.

3.1.7 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tantangan jangka panjang yang dihadapi adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. **Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan penetapan regulasi/ landasan yuridis agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor.** Tantangan lainnya adalah mengembangkan Pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah sehingga dapat berkembang secara merata dan optimal serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di perkotaan dan perdesaan khususnya yang berada di Selatan Kabupaten Garut sejalan dengan rencana pemekaran Kabupaten.

Tantangan aspek pola tata ruang adalah penyediaan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan dalam kondisi luasan lahan yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan lindung yang tidak boleh berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus dipertahankan keberadaannya terutama pada lahan yang produktif. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

3.1.8 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Garut sampai tahun 2025 adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus ditumbuhkembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga memberikan nilai tambah yang berarti.

Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antarpihak atau antardaerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola pembagian peran hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin timbul atas hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

3.2 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain:

1. Posisi wilayah Kabupaten Garut yang Strategis

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, maka menempatkan Garut sebagai bagian dari wilayah pengembangan tengah dengan pusat pertumbuhan Kota Bandung. Untuk itu maka kebijakan pembangunan di Kabupaten Garut turut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan

Kawasan Andalan Priangan Timur yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian lahan kering, hutan produksi, perkebunan, dan perikanan.

2. Ketersediaan Sumber daya Alam yang Potensial

Sumber daya alam yang potensial yang dimiliki berupa sumber daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; sumber daya kelautan, sumber daya pariwisata, serta sumber daya air, pertambangan dan energi yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan perekonomian daerah.

3. Jumlah penduduk yang relatif besar dan agamis

Jumlah penduduk Kabupaten Garut yang diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 3,03 juta penduduk, dengan tingkat kualitas SDM yang semakin meningkat, menjadi sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah. Masyarakat Garut yang religius serta kerukunan antar umat beragama merupakan asset pembangunan yang cukup mempunyai andil besar dalam mensukseskan jalannya proses pembangunan.

4. Karakteristik Budaya Lokal

Potensi budaya daerah tercermin dalam tata kehidupan, kesenian, kreasi produk unggulan, bahasa maupun adat istiadat dan nilai-nilai kegotongroyongan. Potensi etnik dan budaya ini apabila dikelola secara bijaksana, dewasa dan demokratis merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan;

5. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Garut yang besar menjadi potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. Potensi Pariwisata

Sumberdaya pariwisata yang cukup memadai sebagai modal untuk memberdayakan masyarakat. Kabupaten Garut memiliki keindahan sumberdaya alam, peninggalan budaya dan peninggalan sejarah yang potensial untuk dapat dikembangkan untuk daerah tujuan wisata yang menarik dan kompetitif, ditunjang dengan sumberdaya masyarakat yang terkenal ramah dan religius.

7. Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investor dan mempercepat proses pembangunan daerah

Potensi industri dan perdagangan yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Garut diantaranya industri penyamakan kulit, jaket kulit, industri batik, sutera alam, dodol, minyak akar wangi dan industri kerajinan anyaman bambu. Dari berbagai komoditi yang ada, tercatat beberapa diantaranya telah menembus pasar ekspor seperti: teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak dan kain sutera. Potensi tersebut apabila dikembangkan secara optimal diharapkan dapat menjadi sektor andalan dalam menopang aktivitas perekonomian dan pembangunan.

- 8. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam peningkatan investasi di Kabupaten Garut.**

3.3 Isu Strategis

Dengan memperhatikan berbagai tantangan di atas, isu strategis pembangunan di atasnya baik nasional maupun provinsi, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, Sarana dan prasarana, SDM, kualitas pelayanan dan pemerataan;
2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan pemerataan
3. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
4. Masih belum optimalnya pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. **Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran;**
6. Masih rendahnya tingkat daya saing wilayah dalam pembangunan investasi daerah;
7. Masih tingginya tingkat kerusakan lingkungan dan konversi lahan;
8. Belum berjalannya reformasi birokrasi dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut, telah ditetapkan visi Kabupaten Garut:

“TERWUJUDNYA GARUT PANGIRUTAN YANG TATA TENG TREM KERTA RAHARJA MENUJU RIDHO ALLAH”

Dalam pernyataan visi Kabupaten Garut tersebut terdapat empat kata kunci, yaitu Pangirutan, tata tengtrem, kerta raharja, dan ridla allah yang memiliki makna sebagai berikut:

Pangirutan : **cantik**; mengandung makna tujuan pembangunan antara lain untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Garut menjadi wilayah asri, tertata sesuai dengan perencanaan yang pada akhirnya menjadikan wilayah Kabupaten Garut yang **cantik (pangirutan)**. Pengertian cantik bukan hanya dalam wujud fisik (alam) tetapi penghuninya (manusia) memiliki perilaku yang cantik.

Wilayah Kabupaten Garut Pangirutan dapat terwujud dengan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang merupakan prinsip pembangunan yang menyeimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Tata tengtrem : **aman**; keseimbangan pembangunan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan akan mampu untuk membawa wilayah Kabupaten Garut menjadi wilayah yang **tata tengtrem (aman)** yaitu wilayah yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan.

Kerta raharja : **Kemakmuran**; sumber daya alam yang melimpah dan bervariasi yang dimiliki Kabupaten Garut diharapkan mampu memberikan **kemakmuran (kerta raharja)** apabila

diolah oleh manusia-manusia yang cerdas dan terampil. Dengan memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan wilayah Kabupaten Garut.

Ridho Allah : Dengan **ridho Allah** diharapkan pembangunan di Kabupaten Garut pada akhirnya akan menghasilkan Kabupaten Garut yang sejahtera yang berakar dari adat istiadat dan budaya lokal (sunda) yang berwawasan global dan bercorak agamis.

Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Garut, serta berdasarkan kondisi saat ini dengan analisa proyeksi tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

- 1 **Maju**; ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- 2 **Adil**; diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.

- 3 **Sejahtera**; dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- 4 **Berwawasan Lingkungan**; ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.

4.2 Misi Pembangunan Daerah

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi**; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. **Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal yang berdaya saing global serta berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan fokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan dengan memperhatikan kearifan lokal untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, dan regulasi yang mendukung

penciptaan iklim investasi yang kondusif, disertai dengan kemampuan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan;** adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

4.3 Perwujudan Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Garut tahun 2005-2025 tersebut diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui prinsip kebersamaan, kemandirian, keadilan dan keberlanjutan, yang diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan, dan komunikasi yang sehat.

BAB V
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

5.1 Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Garut adalah mewujudkan manusia yang sejahtera, sehat, cerdas, disiplin, kreatif, produktif, inovatif dan berakhlak mulia yang bertanggung jawab bagi terbentuknya masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu ukuran tercapainya perwujudan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera pada tahun 2025, dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan urusan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; sedangkan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dipedomani untuk diselaraskan dengan kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Garut.

Adapun ukuran capaian misi Kabupaten Garut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi.

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya *human investment* melalui peningkatan pendidikan dimulai sejak usia dini sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi agar terbentuk anak, remaja dan masyarakat Kabupaten

Garut yang unggul dan berwawasan luas dengan penguasaan teknologi informasi, yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, pengembangan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar, dan pengembangan Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar.

- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya gaya hidup sehat serta kualitas kesehatan masyarakat yang pada akhir Tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya indeks kesehatan yang berupa Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, meningkatnya status gizi masyarakat, serta rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/ AIDS.
- c. Semakin rendah dan terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk yang dibarengi oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta berdaya saing dengan tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kabupaten Garut.
- d. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan agama, ditandai dengan adanya kerukunan hidup inter dan antar umat beragama.
- e. Meningkatnya kualitas tenaga kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dengan prioritas pada pencapaian keseimbangan tiga kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM.

Sebagai ukuran-ukuran dari capaian misi Kabupaten Garut dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi diwujudkan dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Key Performance Indikator dalam rangka Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Maju, Sehat, Berbudaya, serta Berwawasan Ilmu dan Teknologi

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN RPJPD				
		2009	2014	2019	2024	2025
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	71,56	74,52	78,38	81,70	82,36
	INDEKS KESEHATAN	66,65	69,50	74,52	78,59	79,41
	Angka Harapan Hidup (tahun)	64,99	66,70	69,71	72,16	72,65
	Angka Kematian Bayi (Per Seribu Kelahiran Hidup)	51,65	48,76	45,00	41,51	40,81
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus kelahiran)	219,64	175,74	131,80	87,87	79,09
	INDEKS PENDIDIKAN	82,32	83,41	85,09	86,61	86,92
	Angka Melek Huruf (%)	99,07	99,32	99,48	99,64	99,67
	Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	7,32	7,74	8,45	9,08	9,21
	INDEKS DAYA BELI	65,71	70,64	75,52	79,90	80,74
	Kemampuan Daya Beli (000 Rp)	644,36	665,67	686,77	705,73	709,40
2	JUMLAH PENDUDUK	2.380.981	2.568.753	2.771.332	2.989.888	3.035.625
3	LPP (%)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
4	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	421.223	404.373	320.175	253.509	241.944
5	KETENAGAKERJAAN	17,69	15,74	11,55	8,48	7,97
	Usia Kerja 15 Tahun Keatas	1.594.532	1.720.281	1.855.948	2.002.313	2.032.943
	* Pengangguran	50.091	45.982	42.700	39.059	38.331

Sumber: Analisis BPS Kab. Garut

2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ditandai dengan indikator sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan didukung oleh sektor-sektor lapangan usaha yang berdaya saing tinggi, sehingga pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat pada Tahun 2025 meningkat yang akhirnya diharapkan dapat menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin.

- b. Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa-jasa yang perannya semakin meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing tinggi, meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif serta membaiknya fasilitas jasa keuangan dan pengelolaan keuangan sehingga diharapkan pada akhir tahun 2025 Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi serta nilai ekspor di Kabupaten Garut akan meningkat.
- c. Tercapainya proporsi yang seimbang dalam kredit investasi antara yang dikucurkan oleh sektor perbankan yang digunakan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian sektor swasta dan masyarakat, dengan alokasi pembiayaan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Tingkat keberhasilan pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dapat diukur dengan indikator kinerja (*Key Performance Indikator*) sebagai berikut:

Tabel 5.2
Key Performance Indikator Pembangunan Perekonomian Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN RPJPD				
		2009	2014	2019	2024	2025
1	Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rp)	17.778.351	31.135.148	50.345.663	85.883.349	95.423.478
2	Konsumsi Pemerintah (Juta Rp)	2.649.681	4.640.374	8.039.264	14.133.570	15.803.186
3	LPE (%)	5,57	5,39	5,33	5,57	5,48
4	PDRB Perkapita (Rp)	9.353.884	15.685.792	25.188.569	41.046.183	45.203.524
5	Investasi (Miliar)	2.998,03	5.355,44	9.654,81	17.839,65	20.146,54
6	Laju Investasi (%)	8,55	11,71	12,76	13,02	12,93

Sumber: Analisis BPS Kab. Garut

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor.
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan pengembangan koperasi dan penciptaan akses terhadap lembaga keuangan lainnya.
- c. Terciptanya hubungan dan kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan melalui pengembangan perbatasan wilayah.
- d. Pembangunan kesejahteraan sosial melalui sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung dan bagi masyarakat penyandang masalah sosial.
- e. Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya dilakukan melalui penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang diwujudkan melalui indikator (*Key Performance Indikator*) kontribusi Nilai Tambah sektor terhadap PDRB yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.3

Key Performance Indikator Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN RPJPD				
		2009	2014	2019	2024	2025
1	Pertanian	45,96	42,77	38,84	34,86	34,05
2	Pertambangan dan Bahan Galian	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11
3	Industri Pengolahan	7,78	10,22	13,53	17,2	17,99
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,44	0,48	0,49	0,48	0,48
5	Bangunan (Konstruksi)	2,64	2,8	2,75	2,76	2,77
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,66	26,88	27,08	27,21	27,21
7	Angkutan dan Komunikasi	3,51	3,49	3,81	4	4,02
8	Keuangan dan Persewaan	3,29	3,52	3,45	3,32	3,29
9	Jasa-jasa Lainnya	9,58	9,79	9,94	10,06	10,07

Sumber: Analisis BPS Kab. Garut

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur disemua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang ditandai semakin meningkatnya etos kerja birokrasi serta budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- b. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah yang baik, bebas KKN dan bertanggung jawab yang mempunyai kompetensi tinggi untuk mendukung pembangunan kota dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Ditandai oleh semakin baiknya birokrasi dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Garut.
- c. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkeadilan sehingga terciptanya ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat. Hal ini dilakukan dengan upaya mewujudkan pemerintah yang berdasarkan hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi penyelenggaraan pemerintah serta turut menjaga keamanan pembangunan, sehingga secara sistematis akan mengarah pada rendahnya tingkat kriminalitas, rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial.

5.2 Arah Pembangunan

5.2.1 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi.

Melalui pengembangan dan pembangunan SDM yang memiliki kualifikasi IMTAQ dan IPTEK guna mencapai SDM yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beretika dan bermoral. Serta SDM yang menguasai, dan memanfaatkan IPTEK secara handal dan berkelanjutan. Terbentuknya SDM yang profesional, kreatif, inovatif, inventif, dan bertanggung jawab sehingga dapat menjadi teladan bagi individu, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia pada Tahun 2025 dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain tanpa mengesampingkan budaya dan kepribadian nasional. SDM yang berkualitas didukung pula oleh pertumbuhan penduduk yang seimbang, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang beruntung untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya.

1. Peningkatan human investment melalui peningkatan pendidikan dimulai sejak usia dini sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi agar terbentuk anak, remaja dan masyarakat Kabupaten Garut yang unggul dan berwawasan luas dengan penguasaan teknologi informasi dan Bahasa Asing serta pemanfaatan dan pengembangan IPTEK di berbagai bidang menuju masyarakat yang berbudaya produktif.
2. Pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan gaya hidup sehat serta kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks kesehatan yang berupa Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, Peningkatan status gizi masyarakat, serta rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/ AIDS
3. Pembangunan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercapai suasana

kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

4. Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia melalui penguatan lembaga jaminan sosial.
5. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah
6. Peningkatan kualitas tenaga kerja lebih diarahkan kepada aspek profesionalisme dan kredibilitas sesuai dengan keahlian sehingga memiliki kemandirian, bertalenta tinggi dan merupakan Brand Image kinerja tersendiri yang lebih produktif dalam berkarya yang menjadi keunggulan dari SDM Kabupaten Garut.
7. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan lebih memperhatikan upah kerja yang memadai, keselamatan kerja dan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, didukung dengan penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan jaminan perlindungan anak baik bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat.
9. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
10. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik IPTEK untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan keunggulan daerah

5.2.2 Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal yang berdaya saing global serta berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan fokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan dengan memperhatikan kearifan lokal untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan, serta membangun kemitraan bersama usaha kecil, menengah, dan besar dengan ditunjang oleh regulasi yang kondusif.

1. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing pada skala regional dan nasional, dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan skala lokal, regional dan nasional yang kokoh.
2. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik
3. Pembangunan sektor pertanian yang didorong untuk mengarah pada pengembangan agroindustri dan agribisnis dengan tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai salah satu ruang terbuka kota serta peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian
4. Peningkatan hasil peternakan, pemasaran, dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung usaha peternakan
5. Pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar yang kompetitif.
6. Pemberdayaan Koperasi didorong untuk berkembang secara luas.
7. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja

8. Kelautan dan perikanan dikembangkan untuk meningkatkan optimalitas pengelolaan kelautan dan perikanan dalam upaya pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
9. Pembangunan kehutanan serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.2.3 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

Pemerataan pembangunan diarahkan pada:

1. Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan wilayah
2. Pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan dalam meningkatkan pelayanan dan pengurangan kesenjangan wilayah
3. Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh
4. Pembangunan energi dan sumber daya mineral guna terpenuhinya pasokan energi yang handal, efisien, dan berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.
5. Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi antar sektor secara sinergis, serasi dan berkelanjutan
6. Meningkatkan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

5.2.4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

Adalah melalui pemantapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*); melalui demokrasi dan kebebasan

politik yang bertanggung jawab agar terciptanya stabilitas politik, konsistensi dalam penengakan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam dasar konstitusi Republik Indonesia.

1. Birokrasi yang profesional diarahkan pada membangun aparatur pemerintah Kabupaten Garut yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan
3. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD dan pengawasan masyarakat
4. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah diarahkan pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan.
5. Mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum melalui pembangunan hukum yang diarahkan pada pembinaan aparatur sehingga makin terwujudnya pemahaman hukum yang mantap oleh semua aparatur
6. Memantapkan kehidupan demokrasi, kelembagaan dan semangat kebangsaan, yang lebih kokoh, melaksanakan reformasi struktur politik dan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan dan nilai-nilai toleransi
7. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis, sehingga diperlukan peran aktif pers dan media informasi
8. Pembangunan pada sektor keamanan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban

5.3 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Pembangunan Kabupaten Garut dalam dua puluh tahun ke depan, membutuhkan tahapan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah secara bertahap. Batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi (IPM=80), diproyeksikan baru dapat terwujud pada tahapan RPJMD Daerah Keeempat (tahapan 2019-2024) apabila melihat pada trend proyeksi peningkatan capaian lima tahunan IPM rata-rata sebesar 3,9 poin. Untuk itu diperlukan suatu akselerasi terhadap upaya peningkatan IPM disertai komitmen bersama dan peran aktif dalam perwujudannya antara seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Garut. Setiap tahapan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan permasalahan pembangunan lainnya serta disesuaikan dengan periodisasi jabatan Bupati. Adapun tahapan pembangunan jangka panjang ini diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD yaitu RPJMD ke-1 Tahun 2005-2009, RPJMD ke-2 Tahun 2009-2014, RPJMD ke-3 Tahun 2014-2019 dan RPJMD ke-4 Tahun 2019-2024 (Tahun 2025 sebagai tahun transisi). Setiap sasaran dalam tahapan pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya berdasarkan pada masing-masing misi dan diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan, yang setiap tahapan pembangunan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

5.3.1 RPJMD ke-1 (2005 – 2009)

Pada kurun waktu 2005 – 2009 secara kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut yang ditempuh melalui pengarusutamaan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan guna mempercepat pencapaian Visi Kabupaten Garut disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan daerah yang maju dengan berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta masyarakat yang cerdas, sehat dan

berakhlak mulia. Tahapan dan prioritas pembangunan pada Periode Pertama ini adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, dan berwawasan ilmu dan teknologi

Sasaran misi pertama ini adalah mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang maju dan sejahtera. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan strategi dan kebijakan RPJMD Ke-1 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan pelayanan pendidikan formal dan non formal, serta pemerataan kualitas pelayanan kesehatan, keluarga berencana, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan pendidikan, pemuda, olahraga, kesehatan dan keluarga berencana yang bermutu;
- b. Memantapkan pengamalan kehidupan umat beragama disertai peningkatan toleransi inter dan antar umat beragama yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial;

Misi II : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Sasaran misi kedua ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan, serta usaha perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan pada perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan peranan strategis sektor basis daerah dan pelaku ekonomi

kerakyatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- b. Meningkatkan akses permodalan, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, pembinaan dan peningkatan jaringan pemasaran bagi Koperasi, UMKM, BMT dan BUMD;
- c. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan dan sumberdaya kelautan berbasis agribisnis;
- d. Meningkatkan peluang dan kemitraan usaha secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha disertai pengembangan pelatihan tenaga kerja guna menumbuhkan hubungan dan kesesuaian antara kualifikasi keahlian dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
- e. Strategi meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan guna mendorong daya tarik wisata

Misi III : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Sasaran pada tahap RPJMD Ke-1 misi ini adalah mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana publik, serta peningkatan dampak positif pembangunan sarana dan prasarana publik. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah;

- b. Mengembangkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam rehabilitasi lahan kritis, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengelolaan dan pemanfaatan DAS serta pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. Mengembangkan fungsi lindung dengan kaidah konservasi pada kawasan yang sesuai dengan RTRW Jawa Barat;

Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

Sasaran Misi Keempat pada RPJMD Ke-1 ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan lptek;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang dinamis, beretika serta berorientasi pada upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Memantapkan kemampuan keuangan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah disertai dengan pengawasan untuk menekan tingkat kebocoran;

5.3.2 RPJMD Ke-2 (2009 – 2014)

Tahap Kedua atau RPJMD Ke-2 dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini ditujukan pada terwujudnya Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik, yang diorientasikan kepada penguatan perekonomian masyarakat dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani.

Misi I : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, dan berwawasan ilmu dan teknologi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama merupakan tugas utama pemerintah. Kualitas hidup masyarakat, oleh UNDP diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks paritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi I pada Periode Kedua ini, ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada: Penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional; Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun paripurna dan implementasi Wajar 12 Tahun; Bebas buta huruf Al-Quran bagi lulusan sekolah; Peningkatan proporsi angka partisipasi siswa SMK menjadi 60%; Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar; Pengembangan Puskesmas DTP sesuai dengan standar kebutuhan; Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah; Peningkatan akses pelayanan kesehatan di Wilayah Garut Utara dan Selatan; Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif; Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam

pelaksanaan Syariat Islam; serta Pembinaan dan peningkatan peran guru agama, ulama dan sekolah-sekolah keagamaan.

Misi II : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi II pada Periode Kedua ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan Pengembangan gerakan ekonomi mandiri berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata; Pengembangan ekonomi berbasis energi dan sumberdaya mineral; Diversifikasi usaha petani ke agroindustri; Pengembangan destinasi pariwisata; Pembentukan Desa Mandiri Pangan; Perluasan area tangkap ikan laut dan peningkatan kemampuan peralatan tangkap ikan laut; Revitalisasi pasar tradisional, serta pembinaan dan fasilitasi pelaku pasar tradisional; Penumbuhan aktifitas ekonomi pada Pondok Pesantren; Pembentukan regulasi investasi daerah; serta Peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah

Misi III : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Indikator keberhasilan tujuan meningkatnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan adalah penanganan lahan kritis. Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul. Kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktifnya lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, baik longsor maupun banjir. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibat adanya alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi III pada Periode Kedua ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada: Peningkatan kemantapan jalan kabupaten; Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan antar pusat pertumbuhan dan kecamatan di Wilayah Selatan serta jalur-jalur vertikal menuju Jalan Lintas Selatan; Peningkatan kemantapan jaringan irigasi pemerintah dan Jaringan Irigasi perdesaan; Pengembangan Terminal Tipe A dan B serta pembangunan sub terminal pada pusat-pusat pertumbuhan; Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan persampahan; Penyusunan rencana penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, implementatif dan berkelanjutan; Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral; Penanganan lahan kritis dan pengendalian

degradasi sumber daya alam dan lingkungan; serta Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan limbah industri dan non industri, limbah padat, cair dan gas.

Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan merupakan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan. Pertama, mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, menegakkan *rule of law* (kekuasaan hukum) secara adil. Ketiga, menciptakan transparansi dalam hal arus informasi. Keempat, membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stake holder. Kelima, mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam melayani setiap kebutuhan stakeholder/warga negara. Keenam, seluruh komponen pemerintahan harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat. Ketujuh, mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat. Dan kedelapan, setiap pimpinan mempunyai visi yang strategis dalam mencapai good governance dengan mengembangkan kualitas SDM di semua bidang.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi IV pada Periode Kedua ini, maka ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan; Rasionalisasi struktur kelembagaan dan jumlah aparatur pemerintah daerah; Perumusan konsep SPM pada setiap SKPD dalam peningkatan pelayanan publik; Mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan bersifat aspiratif dan bottom-up; Pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mewujudkan e-government; Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat;

Formulasi fungsi dan peran partai politik dalam sistem pemerintahan; Penanganan permasalahan pertanahan; serta Penanganan pembentukan daerah otonomi baru.

5.3.3 RPJMD Ke-3 (2014 – 2019)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan pelaksanaan Periode Kedua, maka Periode ketiga atau RPJMD Ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks provinsi maupun nasional. Pada tahapan ini, fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan.

Misi I : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, dan berwawasan ilmu dan teknologi

Sasaran pencapaian pembangunan Misi I pada RPJMD Ke-3 ini adalah meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Misi II : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan

memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Sasaran pencapaian pembangunan Misi II pada RPJMD Ke-3 ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah, makin tumbuhnya kawasan ekonomi perdesaan berbasis cluster usaha, disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan.

Misi III : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Sasaran pencapaian pembangunan Misi III pada RPJMD Ke-3 ini yaitu mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang semakin merata, makin meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah, makin meningkatnya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan dimensi tata ruang, yang diharapkan makin lestarinya kondisi lingkungan hidup, berkurangnya kerusakan, pencemaran dan bencana alam, makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup, makin efektifnya langkah-langkah sinkronisasi perencanaan hingga penegakan hukum tata ruang.

Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

Sasaran pencapaian pembangunan Misi IV pada RPJMD Ke-3 ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, meningkatnya kualitas aparatur daerah, makin baiknya kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan, dan makin berkembangnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai komponen. Pada kondisi ini diharapkan semakin mantap regulasi dan kebijakan otonomi daerah dalam berbagai aspek, kondusifnya iklim politik, keamanan, ketertiban, dan hukum daerah, perkuatan sistem kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru, serta makin meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

5.3.4 RPJMD Ke-4 (2019 – 2024)

RPJMD ke-4 ini diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Misi I : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, dan berwawasan ilmu dan teknologi.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Garut di atas, maka sasaran Misi Pertama pada tahap terakhir RPJPD ini adalah memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama, dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

Misi II : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Sasaran pencapaian Misi Kedua pada Periode IV ini adalah mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

Misi III : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Sasaran pencapaian Misi Ketiga pada Periode IV ini adalah mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal, yang didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari, dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

Sasaran pencapaian Misi Keempat pada tahap terakhir RPJPD ini adalah mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasnya masyarakat atas pelayanan yang

diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsisten kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum, dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas, serta semamin mantapnya sistem kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru

Selanjutnya, untuk tahapan dan prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada Matriks Keterkaitan Arah dan Tahapan Kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 yang tercantum pada Lampiran I Dokumen RPJPD ini.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 sesuai dengan fungsinya adalah sebagai dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Garut 20 tahun ke depan melalui pilar, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menerapkan 3 (tiga) pilar dari *Good Governance* yang meliputi **transparansi**, **akuntabilitas** dan **partisipasi** dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Garut 2005-2025 ini.
 - **Transparansi** berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. Konsep transparansi dapat dijelaskan dalam 2 (dua) konteks yaitu transparansi proses dan transparansi produk. **Transparansi Proses** berarti publik berhak mendapatkan akses untuk mengetahui langkah-langkah sebuah kebijakan dibuat dan siapa yang berperan pada pembuat kebijakan tersebut. **Transparansi Produk** berarti hasil dari proses harus langsung menjasi sebuah dokumen publik dan memastikan bahwa aksesibilitas dari publik terhadap produk tidak terhambat.
 - **Akuntabilitas** atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada

pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik yang dapat pula berarti penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundangan-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan masyarakat, dan daerah lainnya.

- **Partisipasi** merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting.
2. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung-jawab/ tugas yang melekat pada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Dokumen RPJPD Kabupaten Garut ini, sesuai dengan sifatnya sebagai dokumen induk perencanaan, dalam operasionalisasinya perlu dilakukan penajaman-penajaman melalui dokumen-dokumen yang bersifat lebih operasional. Dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan pendekatan RPJPD ini memperkenankan penajaman prioritas, bila kondisi memaksa dan/ atau asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RPJMD ini telah berubah.

RPJP Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RPJP Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJMD Kabupaten, Renstra Organisasi Perangkat Daerah, Renja Organisasi Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) di Kabupaten Garut berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Garut, tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Garut. Untuk itu RPJPD Kabupaten Garut 2005-2025 ini perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI GARUT,

ACENG H. M. FIKRI

Lampiran 1

Matriks Keterkaitan Arah dan Tahapan Kebijakan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2005-2025

Lampiran 1:

**MATRIKS KETERKAITAN
ARAH DAN TAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005-2025**

Misi 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi.

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sosial, Budaya dan Agama	Peningkatan <i>human investment</i> melalui peningkatan pendidikan dimulai sejak usia dini sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi agar terbentuk anak, remaja dan masyarakat Kabupaten Garut yang unggul dan berwawasan luas dengan penguasaan teknologi informasi dan Bahasa Asing serta pemanfaatan dan pengembangan IPTEK di berbagai bidang menuju masyarakat yang berbudaya produktif.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; • Pendidikan Anak Usia Dini; • Pendidikan Menengah; • Pendidikan Non Formal; • Manajemen Pelayanan Pendidikan; serta • Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan mutu pendidikan dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dan penancangan Wajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; • Pendidikan berbasis kompetensi dalam pendidikan formal dan non formal; • Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan; • Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; • Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan; • Peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat; serta • Pengarustamaan Gender bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi Pelaksanaan Wajar 12 Tahun yang didukung dengan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah; • Pemantapan pendidikan anak usia dini melalui peningkatan daya tampung lembaga PAUD baik formal maupun non-formal; • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; • Peningkatan kompetensi tenaga pendidik; • Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis life skill; • Pengembangan Perguruan Tinggi melalui upaya kerjasama yang difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan pendidikan anak usia dini; • Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; • Pengembangan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar; • Pengembangan Sekolah Berstandar International (SBI); • Pengembangan dan inovasi kelembagaan pendidikan; • Terpenuhinya kompetensi tenaga pengajar; • Pengembangan Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar; serta • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan gaya hidup sehat serta kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks kesehatan yang berupa Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, Peningkatan status gizi masyarakat, serta rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS</p>	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan; Pengawasan obat dan makanan; Pengembangan obat asli Indonesia; • Penciptaan lingkungan sehat; Upaya kesehatan masyarakat; • Pencegahan dan penanggulangan penyakit; • Peningkatan kesadaran akan PHBS; • Pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan; • Perluasan jangkauan unit pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal dan terpencil; • Evaluasi pelaksanaan manajemen kesehatan; • Pemuktahiran data melalui sensus kesehatan masyarakat; • Perbaikan Gizi Masyarakat; • Sumber Daya Kesehatan; • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem operasional pelayanan kesehatan dasar rujukan terutama bagi masyarakat miskin; • Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; • Peningkatan akurasi dan aktualisasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan; • Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan; • Pengembangan akses pelayanan kesehatan rujukan; • Pengembangan konsep pembangunan berwawasan kesehatan kepada setiap pemegang kebijakan pembangunan, • Penyusunan kebijakan bersama pembangunan berwawasan kesehatan, • Penajaman prioritas untuk keluarga miskin karena rawan terhadap masalah kesehatan perlu diberi prioritas tinggi. (bayi, balita, bumil, bufas, usia lanjut) • Penajaman prioritas program. Untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kesehatan perlu lebih memberi prioritas pada program yang berdampak untkit besar misalnya : KIA, Gizi, penyakit menular tertentu, dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; • Peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara proporsional; • Perluasan pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan; • Peningkatan ketersediaan farmasi dan obat yang bermutu; serta • Peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. • Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM tenaga kesehatan dalam menghadapi perdagangan bebas, • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, • Peningkatan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui penempatan dokter dan bidan desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil. • Peningkatan promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. • Meningkatkan manajemen pembangunan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan; • Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, desa sehat, serta desa siaga. • Upaya memberdayakan masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan melalui polindes wahana kesahatan dasar, santri raksa desa dan gerakan sayang ibu. • Perkuatan sistem kesehatan melalui kemandirian masyarakat pada pelayanan kesehatan, sasaran-sasaran akses pelayanan, kewaspadaan dini terhadap penyakit dan kesadaran hidup sehat dan bersih. • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, • Peningkatan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui penempatan dokter dan bidan desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil, • Peningkatan promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. • Meningkatkan manajemen pembangunan kesehatan.

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercapai suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.	Sosial dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan; • Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan; • Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama; • Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan; serta • Penelitian dan Pengembangan Agama • Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan keagamaan melalui dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa, dan toleransi. • Peningkatan pendidikan agama pada semua lembaga pada pendidikan formal, informal dan non formal melalui penambahan jam pelajaran pendidikan agama setiap minggunya. • Pembangunan karakter bangsa melalui internalisasi, eksternalisasi, dan objektivitas nilai-nilai keagamaan seperti nilai kejujuran, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, kebijaksanaan dan keadilan pada seluruh jenjang pendidikan. • Implementasi nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal; • Peningkatan sikap saling menghargai dan menghormati antar berbagai komunitas budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Garut yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; • Pemantapan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama. • Pemantapan upaya personalisasi nilai-nilai keagamaan di persekolahan, sehingga nilai-nilai keagamaan tersebut menjadi etos pembangunan bangsa dan negara. • Pembentukan agama sebagai sumber motivasi yang tercermin dalam pembangunan seperti wakaf dan hibah tanah, dana pendidikan, pengarahannya sebagai etos kegotongroyongan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Garut • Peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah pemuka agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. • Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pemahaman agama dalam bidang kehidupan politik. • Peningkatan bidang keagamaan melalui perubahan paradigma agama sebagai etos pembangunan dan motivasi sebagai aset pembangunan pemerintah. • Peningkatan bidang keagamaan melalui perubahan paradigma agama sebagai etos pembangunan, sehingga agama dapat diyakini dan dihayati oleh masyarakat.
		Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	Kependudukan dan Keluarga Berencana	<p>Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Berencana dan Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; • Keserasian Kebijakan Kependudukan; dan • Penataan Administrasi Kependudukan 	<p>Pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan serta meningkatkan jumlah cakupan peserta KB; • Peningkatan pemahaman kesehatan terutama ibu dan anak; dan • Peningkatan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat 	<p>Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan serta meningkatkan jumlah cakupan peserta KB; • Peningkatan pemahaman kesehatan terutama ibu dan anak; dan • Peningkatan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat 	<p>Mempertahankan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan serta meningkatkan jumlah cakupan peserta KB; • Peningkatan pemahaman kesehatan terutama ibu dan anak; dan • Peningkatan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia melalui penguatan lembaga jaminan sosial.	Sosial	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil dan kesejahteraan sosial. • Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Peningkatan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial PMKS 	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penggalian potensi, kemauan, kemampuan dan keterampilan serta sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; • Peningkatan partisipasi sosial masyarakat; • Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Peningkatan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial PMKS 	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penggalian potensi, kemauan, kemampuan dan keterampilan serta sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; • Peningkatan partisipasi sosial masyarakat; • Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Peningkatan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial PMKS 	<p>Mempertahankan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penggalian potensi, kemauan, kemampuan dan keterampilan serta sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; • Peningkatan partisipasi sosial masyarakat; • Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Peningkatan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial PMKS
		Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah	Sosial dan Budaya	<p>Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan, pengelolaan kekayaan budaya daerah; • Penataan sistem nilai budaya sunda yang berbudi luhur yang aplikasinya di masyarakat melalui pemasyarakatan nilai-nilai budi pekerti sunda disamping bahasa dan sastra sunda • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah dan • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional 	<p>Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan, pengelolaan kekayaan budaya daerah; • Penataan sistem nilai budaya sunda yang berbudi luhur yang aplikasinya di masyarakat melalui pemasyarakatan nilai-nilai budi pekerti sunda disamping bahasa dan sastra sunda • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah dan • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional 	<p>Perkuatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan, pengelolaan kekayaan budaya daerah; • Penataan sistem nilai budaya sunda yang berbudi luhur yang aplikasinya di masyarakat melalui pemasyarakatan nilai-nilai budi pekerti sunda disamping bahasa dan sastra sunda • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah dan • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional 	<p>Mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan, pengelolaan kekayaan budaya daerah; • Penataan sistem nilai budaya sunda yang berbudi luhur yang aplikasinya di masyarakat melalui pemasyarakatan nilai-nilai budi pekerti sunda disamping bahasa dan sastra sunda • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah dan • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan kualitas tenaga kerja lebih diarahkan kepada aspek profesionalisme dan kredibilitas sesuai dengan keahlian sehingga memiliki kemandirian, bertalenta tinggi dan merupakan <i>Brand Image</i> kinerja tersendiri yang lebih produktif dalam berkarya yang menjadi keunggulan dari SDM Kabupaten Garut.	Ketenagakerjaan	<p>Peningkatan kompetensi dan daya saing, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. • Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja • Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 	<p>Peningkatan kompetensi dan daya saing, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja; • Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja; • Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. • Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja 	<p>Perkuatan kompetensi dan daya saing, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja; • Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja; • Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. • Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja 	<p>Pemantapan kompetensi dan daya saing, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja; • Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja; • Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. • Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja
		Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan lebih memperhatikan upah kerja yang memadai, keselamatan kerja dan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja.	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan kesempatan kerja melalui Transmigrasi; • Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; dan • Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran • Pelayanan antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja On Line; • Pemberdayaan Bursa Kerja swasta; dan • Pengembangan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran • Pelayanan antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja On Line; • Pemberdayaan Bursa Kerja swasta; dan • Pengembangan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran • Pelayanan antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja On Line; • Pemberdayaan Bursa Kerja swasta; dan • Pengembangan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan
		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, didukung dengan penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan jaminan perlindungan anak baik bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kelembagaan; Pengarusutamaan Gender dan Anak; • Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan perempuan; dan • Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan; • Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan melalui pendidikan dan peran sertanya dalam pembangunan pendidikan. • Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, • Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, • Pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak • Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, • Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, • Pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak • Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.	Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pembinaan organisasi Kepemudaan; • Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda; • Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; • Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; • Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga; • Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan • Pembinaan Olahraga dan Seni Pelajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Pengembangan sistem pembibitan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah; • Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Peningkatan peran dan kemampuan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba • Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dalam Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga • Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan • Pembinaan Olahraga dan Seni Pelajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Pengembangan sistem pembibitan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah; • Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Peningkatan peran dan kemampuan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba • Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dalam Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga • Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan • Pembinaan Olahraga dan Seni Pelajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Pengembangan sistem pembibitan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah; • Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Peningkatan peran dan kemampuan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba • Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dalam Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga • Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan • Pembinaan Olahraga dan Seni Pelajar
2.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik IPTEK untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan keunggulan daerah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah; • Pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung masyarakat berwawasan ilmu dan teknologi; • perwujudan layanan pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi • Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah; • Pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung masyarakat berwawasan ilmu dan teknologi; • perwujudan layanan pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi • Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; • Pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung masyarakat berwawasan ilmu dan teknologi; • perwujudan layanan pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi • Pengembangan dan penerapan teknologi industri melalui: • Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; • Pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung masyarakat berwawasan ilmu dan teknologi; • perwujudan layanan pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi • Pengembangan dan penerapan teknologi industri melalui: • Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan dengan memperhatikan kearifan lokal yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ekonomi	Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing pada skala regional dan nasional, dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan skala lokal, regional dan nasional yang kokoh.	Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM industri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Pengembangan sentra-sentra industri potensial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM industri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Pengembangan sentra-sentra industri potensial • Peningkatan Kapasitas IPTEK dalam Sistem Produksi • Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri • Penataan Struktur Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengembangan SDM industri • Penguatan kemampuan Industri Kecil dan Menengah • Pengembangan kluster industri potensial • Penguatan Kapasitas IPTEK dalam Sistem Produksi • Penguatan Kemampuan Teknologi Industri • Penataan Struktur Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengembangan SDM industri • Pemantapan Kemampuan Industri Kecil dan Menengah • Penguatan kluster industri potensial • Penerapan IPTEK dalam Sistem Produksi • Standarisasi industri manufaktur • Penguatan Struktur Industri
				<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Pengembangan produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perlindungan terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Peningkatan dan pengembangan produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan • Revitalisasi pasar tradisional • Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur perdagangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perlindungan Terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Operasionalisasi dan Pengembangan Unit Kemetropolitan Daerah • Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan • Pengembangan kluster produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan • Revitalisasi pasar tradisional • Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur perdagangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Perlindungan terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan pelayanan operasional Unit kemetropolitan Daerah • Pemantapan sistem dan jaringan informasi perdagangan • Penguatan kluster produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan • Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur perdagangan;

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik	Investasi dan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan potensi sumberdaya; • Penyiapan Sarana dan prasarana daerah yang mendukung investasi; • Peningkatan iklim dan realisasi investasi, dan • Peningkatan promosi dan kerjasama investasi pemerintah daerah dengan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan potensi sumberdaya; • Penyiapan Sarana dan prasarana daerah yang mendukung investasi; • Peningkatan iklim investasi yang kondusif • Peningkatan realisasi investasi • Peningkatan promosi dan kerjasama investasi pemerintah daerah dengan swasta. • Peningkatan kualitas pelayanan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistim dan jaringan informasi potensi dan peluang investasi • Pengembangan Sarana dan prasarana daerah yang mendukung investasi; • Peningkatan iklim investasi yang kondusif • Penguatan investasi daerah, • Peningkatan promosi dan kerjasama investasi pemerintah daerah dengan swasta. • Perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus/kawasan investasi, serta • Pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan sistim dan jaringan informasi potensi peluang investasi • Penguatan Sarana dan prasarana daerah yang mendukung investasi; • Peningkatan iklim investasi yang kondusif • Penguatan investasi daerah • Peningkatan promosi dan kerjasama investasi pemerintah daerah dengan swasta. • Perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus/kawasan investasi, serta • Penguatan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.
		Pembangunan sektor pertanian yang didorong untuk mengarah pada pengembangan agroindustri dan agribisnis dengan tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai salah satu ruang terbuka kota serta peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani • Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan • Mengembangkan pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan • Peningkatan daya saing produk pertanian • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan dan • Pengembangan Penyuluhan Pertanian penerapan teknologi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan lahan abadi pertanian • Peningkatan peran, kemampuan usaha dan kesejahteraan petani • Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan • Mengembangkan pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan • Peningkatan daya saing produk pertanian • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan dan • Pengembangan Penyuluhan Pertanian penerapan teknologi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan lahan abadi pertanian • Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. • Pemantapan peran dan kesejahteraan petani • Perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, • Perbaikan dan penataan subsistem agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian • Pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan. • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan • Penguatan Penyuluhan Pertanian penerapan teknologi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan lahan abadi pertanian • Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. • Pemantapan peran dan kesejahteraan petani • Pemantapan infrastruktur pendukung pertanian, • Penguatan sistem agribisnis secara tepat guna dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian • Pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan • Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian,

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan hasil peternakan, pemasaran, dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung usaha peternakan	Pertanian (Peternakan)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dan kemampuan usaha peternak Peningkatan produksipeternakan Mengembangkan pasar produksi peternakan Peningkatan daya saing produk peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran, kemampuan usaha dan kesejahteraan peternak Peningkatan produksi hasil peternakan; Pembangunan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan Pengembangan kapasitas kawasan peternakan Mewujudkan wilayah bebas bahaya penyakit hewan/ternak serta Peningkatan rasa aman masyarakat terhadap konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan peran dan kesejahteraan peternak Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil peternakan Operasionalisasi pasar produksi hasil peternakan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Peningkatan teknologi peternakan; Pengembangan kapasitas kawasan peternakan Mewujudkan wilayah bebas bahaya penyakit hewan/ternak serta Peningkatan rasa aman masyarakat terhadap konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan peran dan kesejahteraan peternak Penguatan kualitas dan kuantitas produksi hasil peternakan Peningkatan kualitas pelayanan pasar produksi hasil peternakan Penguatan pemasaran hasil produksi peternakan Penerapan teknologi peternakan; Pengembangan kapasitas kawasan peternakan Peningkatan rasa aman masyarakat terhadap usaha dan produk peternakan
		Pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar yang kompetitif.	KUMKM	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pengembangan kewirausahaan, dan keunggulan kompetitif UMKM Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Akses permodalan dan peningkatan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM Pengembangan kewirausahaan, dan keunggulan kompetitif UMKM Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Pengembangan desain dan pola promosi untuk perluasan akses pasar; Pemberdayaan UMKM Peningkatan akses permodalan dan produktivitas UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan usaha UMKM Penguatan sistem pendukung usaha bagi UMKM Peningkatan pemasaran produk UMKM Penguatan kemitraan usaha antara UMKM dengan Usaha Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan usaha UMKM Pemantapan sistem pendukung usaha bagi UMKM Peningkatan kemampuan akses pasar bagi UMKM Pemantapan kemitraan usaha antara antara UMKM dengan Usaha Besar
		Pemberdayaan Koperasi didorong untuk berkembang secara luas.	KUMKM	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan dan pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan NonPerbankan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian daerah melalui penguatan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan dan pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non-Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran koperasi dalam perekonomian daerah Peningkatan kualitas kelembagaan, kapasitas, produktifitas dan efisiensi usaha Koperasi Penguatan lembaga BUMD dan Lembaga Keuangan non perbankan Optimalisasi sumber daya Koperasi yang produktif dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan peran koperasi dalam perekonomian daerah Peningkatan kualitas kelembagaan, kapasitas, produktifitas dan efisiensi usaha Koperasi Pemantapan kelembagaan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan Optimalisasi sumber daya Koperasi yang produktif dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja	Pariwisata dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengembangan Prasarana Pariwisata; • Pengembangan Nilai Budaya; • Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya Daerah; dan • Program Pembinaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; • Pengembangan kemitraan, promosi dan pemasaran pariwisata Pengembangan kemitraan; • Pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah sebagai aset wisata • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kualitas destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; • Peningkatan pengembangan kemitraan, promosi dan pemasaran pariwisata; • Pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah sebagai aset wisata • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional • Pengembangan potensi wisata religius • Pengembangan pariwisata yang berakar pada alam dan budaya daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Garut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kualitas destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; • Pemantapan kemitraan, promosi dan pemasaran pariwisata; • Pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah sebagai aset wisata • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional • Pengembangan potensi wisata religius • Pengembangan pariwisata yang berakar pada alam dan budaya daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Garut.
		Kelautan dan perikanan dikembangkan untuk meningkatkan optimalitas pengelolaan kelautan dan perikanan dalam upaya pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan.	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan. • Peningkatan pengembangan pengelolaan sumberdaya kelautan • Pengembangan usaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; • Pengembangan budidaya perikanan; • Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; • Pengembangan perikanan tangkap • Pengembangan sistem penyuluhan; • Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan; • Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut; • Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; • Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SD Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat pesisir; • Peningkatan produksi, penanganan, pengolahan dan peningkatan mutu produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan • Peningkatan usaha diversifikasi produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan ; • Pengembangan pasar komoditi di wilayah pesisir; • Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; • Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan aktifitas ekonomi masyarakat pesisir • Peningkatan produksi, penanganan, pengolahan dan peningkatan mutu produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan • Penguatan usaha diversifikasi produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan; • Pengembangan pasar komoditi di wilayah pesisir; • Penguatan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; • Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan • Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah pesisir

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan kehutanan serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan • Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil kehutanan • Pemanfaatan potensi sumber daya hutan • Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan • Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan • Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil kehutanan • Peningkatan pemanfaatan potensi lahan di sekitar hutan • Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan • Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan • Peningkatan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; • Peningkatan penanganan lahan kritis dan fungsi kawasan lindung; • Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan • Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil kehutanan • Peningkatan pemanfaatan potensi lahan di sekitar hutan • Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan • Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan • Peningkatan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; • Peningkatan penanganan lahan kritis dan fungsi kawasan lindung; • Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan • Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil kehutanan • Peningkatan Pemanfaatan potensi lahan di sekitar hutan • Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan • Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan • Peningkatan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; • Peningkatan penanganan lahan kritis dan fungsi kawasan lindung; • Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM industri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Pengembangan sentra-sentra industri potensial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM industri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Pengembangan sentra-sentra industri potensial • Peningkatan Kapasitas IPTEK dalam Sistem Produksi • Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri • Penataan Struktur Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengembangan SDM industri • Penguatan kemampuan Industri Kecil dan Menengah • Pengembangan klaster industri potensial • Penguatan Kapasitas IPTEK dalam Sistem Produksi • Penguatan Kemampuan Teknologi Industri • Penataan Struktur Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengembangan SDM industri • Pemantapan Kemampuan Industri Kecil dan Menengah • Penguatan klaster industri potensial • Penerapan IPTEK dalam Sistem Produksi • Standarisasi industri manufaktur • Penguatan Struktur Industri

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Pengembangan produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perlindungan terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Peningkatan dan pengembangan produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan • Revitalisasi pasar tradisional • Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur perdagangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perlindungan Terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Operasionalisasi dan Pengembangan Unit Kemetropolitan Daerah • Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan • Pengembangan kluster produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan • Revitalisasi pasar tradisional • Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur perdagangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Perlindungan terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan pelayanan operasional Unit kemetropolitan Daerah • Pemantapan sistem dan jaringan informasi perdagangan • Penguatan kluster produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan • Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur perdagangan;

Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)	Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan wilayah	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis • Penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa; • Pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. • Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa; • Peningkatan jalan dan jembatan pada ruas vertikal menuju jalan lintas selatan, Jalur-jalur Produksi, Kawasan strategis. • Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi; dan pusat pelayanan • Peningkatan dan pemantapan infrastruktur perdesaan • Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jalan dan jembatan pada jalur-jalur produksi, kawasan strategis. • Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi; dan pusat pelayanan • Peningkatan dan pemantapan infrastruktur perdesaan • Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan • Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi • Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok di wilayah rawan air, rawan defisit air, desa tertinggal dan wilayah padat pemukiman; • Meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan data dan Informasi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Jalan • Peningkatan jalan dan jembatan pada jalur-jalur produksi, kawasan strategis. • Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi; dan pusat pelayanan • Peningkatan dan pemantapan infrastruktur perdesaan • Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan • Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi • Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok di wilayah rawan air, rawan defisit air, desa tertinggal dan wilayah padat pemukiman; • Meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah;

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan dalam meningkatkan pelayanan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan dan peningkatan infrastruktur transportasi, terminal serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan • Peningkatan sumber daya aparatur perhubungan yang profesional • Penyediaan prasarana & sarana perhubungan • Peningkatan pelayanan perijinan dan jasa perhubungan • Peningkatan tertib lalu lintas melalui penataan manajemen transportasi dan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan dan peningkatan infrastruktur transportasi, terminal serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan • Peningkatan sumber daya aparatur perhubungan yang profesional • Penyediaan prasarana & sarana perhubungan • Peningkatan pelayanan perijinan dan jasa perhubungan • Studi kelayakan terminal Tipe A dan B serta terminal pada pusat-pusat pertumbuhan • Studi Kelayakan pelabuhan laut dan transportasi udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan dan peningkatan infrastruktur transportasi, terminal serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan • Peningkatan sumber daya aparatur perhubungan yang profesional • Penyediaan prasarana & sarana perhubungan • Peningkatan pelayanan perijinan dan jasa perhubungan • Pengembangan terminal Tipe A dan B serta pembangunan terminal pada pusat-pusat pertumbuhan • Pembangunan pelabuhan laut dan transportasi udara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan dan peningkatan infrastruktur transportasi, terminal serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan • Peningkatan sumber daya aparatur perhubungan yang profesional • Penyediaan prasarana & sarana perhubungan • Peningkatan pelayanan perijinan dan jasa perhubungan • Pembangunan pelabuhan laut dan transportasi udara • Operasionalisasi pelabuhan dan terminal baru serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan;
		Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh	Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau • Pengembangan Perumahan dan Permukiman; • Pemberdayaan Komunitas Permukiman • Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah dan sanitasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau • Pengembangan Perumahan dan Permukiman; • Pemberdayaan Komunitas Permukiman • Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah dan sanitasi) • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan • Peningkatan kualitas konstruksi bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat • Peningkatan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau • Meningkatkan pengembangan perumahan dan permukiman; • Meningkatkan pemberdayaan komunitas permukiman • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan • Peningkatan kualitas konstruksi bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat • Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan Air limbah perkotaan • Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perdesaan • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan • Peningkatan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan dan memantapkan penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau • Memantapkan pengembangan perumahan dan permukiman; • Mempertahankan sistem pemberdayaan komunitas permukiman • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan • Peningkatan kualitas konstruksi bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat • Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan Air limbah perkotaan • Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perdesaan • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan • Peningkatan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan energi dan sumber daya mineral guna terpenuhinya pasokan energi yang handal, efisien, dan berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi serta pengembangan energi alternatif, diarahkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan perdesaan dan rumah tangga • Peningkatan ketersediaan energi alternatif yang ramah lingkungan • Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan • Pembinaan Ketenagalistrikan usaha energi terbarukan dan konservasi energi 	<p>Meningkatkan penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi serta pengembangan energi alternatif, diarahkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan dan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan perdesaan dan rumah tangga • Peningkatan ketersediaan energi alternatif yang ramah lingkungan • Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; • Pembinaan Ketenagalistrikan usaha energi terbarukan dan konservasi energi • Pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, • Peningkatan investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, • Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, • Pengembangan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas bumi, bio fuel, mikrohidro, surya, angin dan gelombang laut 	<p>Peningkatan upaya konservasi dan penghematan energi yang berkelanjutan, diarahkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan perdesaan dan rumah tangga • Peningkatan ketersediaan energi alternatif yang ramah lingkungan • Pembinaan Ketenagalistrikan usaha energi terbarukan dan konservasi energi • Pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, • Peningkatan investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, • Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, • Pengembangan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas bumi, bio fuel, mikrohidro, surya, angin dan gelombang laut • Pemanfaatan sumber energi terbarukan, energi air merupakan energi yang potensial lokal yang diarahkan pemanfaatannya untuk pelistrikan di daerah perdesaan atau daerah terpencil 	<p>Mempertahankan dan memantapkan upaya konservasi dan penghematan energi yang berkelanjutan, diarahkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan perdesaan dan rumah tangga • Peningkatan ketersediaan energi alternatif yang ramah lingkungan • Pembinaan Ketenagalistrikan usaha energi terbarukan dan konservasi energi • Pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, • Peningkatan investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, • Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, • Pengembangan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas bumi, bio fuel, mikrohidro, surya, angin dan gelombang laut • Pemanfaatan sumber energi terbarukan, energi air merupakan energi yang potensial lokal yang diarahkan pemanfaatannya untuk pelistrikan di daerah perdesaan atau daerah terpencil

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Wilayah dan Tata Ruang	Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi antar sektor secara sinergis, serasi dan berkelanjutan	Tata Ruang	<p>Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang; • Penyusunan kebijakan produk rencana tata ruang • Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang • Peningkatan dan pemantapan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut • Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; • Perlunya pemantapan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung • Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya 	<p>Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas, implementatif dan berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang; • Penyusunan kebijakan produk rencana tata ruang wilayah • Perencanaan tata ruang untuk kawasan-kawasan strategis • Pengembangan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi • Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang • Peningkatan dan pemantapan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut • Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; • Perlunya pemantapan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung • Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya 	<p>Meningkatkan keseimbangan tata ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan memadai untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas masyarakat dengan kawasan konservasi, dengan prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang; • Perencanaan tata ruang untuk kawasan-kawasan khusus dan strategis • Pengembangan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi • Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang • Peningkatan dan pemantapan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut • Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; • Perlunya pemantapan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung • Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya • Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan proporsi Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya sesuai rencana tata ruang • Implementasi lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, secara konsisten 	<p>Mempertahankan keseimbangan tata ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan memadai untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas masyarakat dengan kawasan konservasi, dengan prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang; • Perencanaan tata ruang untuk kawasan-kawasan khusus dan strategis • Pengembangan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi • Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang • Peningkatan dan pemantapan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut • Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; • Perlunya pemantapan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung • Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya • Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan proporsi Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya sesuai rencana tata ruang • Implementasi lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, secara konsisten

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan, • Pemantapan kepranataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. • Penguatan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, • Optimalisasi penggunaan teknologi ramah lingkungan, • Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, sumber daya pesisir dan laut serta kawasan lindung • Penguatan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik secara adil dan konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan, • Penguatan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, • Optimalisasi penggunaan teknologi ramah lingkungan, • Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, pesisir dan laut serta kawasan lindung • Penguatan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik secara adil dan konsisten • Peningkatan daya dukung lingkungan, serta pengendalian tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, • Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, pesisir dan laut serta kawasan lindung • Penguatan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik secara adil dan konsisten • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, • Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup • Peningkatan upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam • Pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan daya dukung lingkungan dalam pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, • Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah • Mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat • Penguatan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik secara adil dan konsisten • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, • Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup • Pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pemerintahan dan Aparatur	Birokrasi yang profesional diarahkan pada membangun aparatur pemerintah Kabupaten Garut yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur • Pengembangan teknologi informasi dalam database pegawai • Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi • Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima; • Peningkatan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan; • Peningkatan pelayanan kepada masyarakat • Peningkatan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur • Pengembangan teknologi informasi dalam database pegawai • Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi • Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima; • Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; • Peningkatan pelayanan kepada masyarakat • Peningkatan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. • Penanganan pembentukan daerah otonomi baru • Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur • Pengembangan teknologi informasi dalam database pegawai • Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi • Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima; • Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; • Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. • Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing; • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik; • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik; • Fasilitasi perkuatan sistem kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru • Makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal • Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur • Penerapan teknologi informasi dalam database pegawai • Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi • Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima; • Pemantapan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem, prosedur dan standarisasi kualitas pelayanan; • Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing; • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik; • Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha; • Fasilitasi pemantapan regulasi dan kebijakan otonomi daerah dalam berbagai aspek • Pemantapan sistem kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru • Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan atau pemangku kepentingan lainnya

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan • Pengendalian perencanaan pembangunan • Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan • Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan pihak lain dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up); • Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah; • Peningkatan profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah • Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan; • Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah; • Peningkatan profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah • Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis IT (<i>Information Technology</i>) • Pengendalian perencanaan pembangunan • Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan • Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan pihak lain dalam pembangunan
		Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD dan pengawasan masyarakat	Pengawasan	<p>Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. • Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan • Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan; • Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. • Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan • Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat 	<p>Memperkuat sistem pengendalian internal dan mengembangkan sistem pengawasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. • Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan • Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat 	<p>Mempertahankan pengendalian sistem pengendalian internal dan mengembangkan sistem pengawasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. • Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan • Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah diarahkan pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan.	Keuangan Daerah	<p>Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan daerah yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya • Peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, • Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil • Peningkatan aspek kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah, diprioritaskan pada: • Peningkatan pendapatan daerah yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya • Peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, • Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil • Optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada dengan tidak membebankan terhadap masyarakat disertai pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya • Peningkatan aspek kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 	<p>Peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan daerah yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya • Peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, • Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi • Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil • Optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada dengan tidak membebankan terhadap masyarakat disertai pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya • Peningkatan aspek kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 	<p>Pemantapan pengelolaan keuangan pemerintah, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan daerah yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya • Peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, • Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi • Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil • Optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada dengan tidak membebankan terhadap masyarakat disertai pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya • Peningkatan aspek kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
				<p>Peningkatan pengelolaan aset daerah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Aset, baik inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. • Legal Audit, berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal 	<p>Peningkatan pengelolaan aset daerah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Aset, baik inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. • Legal Audit, berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal 	<p>Perkuatan pengelolaan aset melalui Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset, yang diprioritaskan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Aset, baik inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. • Penilaian Aset. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. • Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset • Optimalisasi Aset melalui pemantapan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang terkandung dalam aset tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Aset melalui pemantapan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang terkandung dalam aset tersebut. • Identifikasi dan pengelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum melalui pembangunan hukum yang diarahkan pada pembinaan aparatur sehingga makin terwujudnya pemahaman hukum yang mantap oleh semua aparatur	Hukum	<p>Pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, • Perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar • Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat 	<p>Pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, • Perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar • Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat. • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ; 	<p>Penguatan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, • Perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar • Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat. • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ; • Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan 	<p>Pemantapan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, • Perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar • Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat. • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ; • Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan
		Memantapkan kehidupan demokrasi, kelembagaan dan semangat kebangsaan, yang lebih kokoh, melaksanakan reformasi struktur politik dan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan dan nilai-nilai toleransi	Politik	<p>Pembangunan Bidang Politik dalam memantapkan kehidupan demokrasi diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan fungsi partai politik, • Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, • Penguatan peran masyarakat madani (civil society), • Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, • Penatahan hubungan eksekutif dan legislatif, 	<p>Perkuatan pembangunan politik dalam memantapkan kehidupan demokrasi diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kehidupan demokrasi, • Peningkatan semangat kebangsaan, • pemantapan peran dan fungsi partai politik, • peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, • penguatan peran masyarakat madani (civil society), • pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, • penatahan hubungan eksekutif dan legislatif, • Penataan daerah otonom dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali; 	<p>Pemantapan pembangunan politik dalam memantapkan kehidupan demokrasi diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kehidupan demokrasi, • Pemantapan semangat kebangsaan, • Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, • Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, • Perluasan akses partisipasi publik; • Pengembangan budaya politik kewargaan; • Penataan daerah otonom dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali; • Pengembangan kerja sama antar daerah • Membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani • Peningkatan kapasitas pemimpin dan anggota DPRD sebagai optimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD 	<p>Pemantapan pembangunan politik dalam memantapkan kehidupan demokrasi diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kehidupan demokrasi, • Pemantapan semangat kebangsaan, • Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, • Penguatan peran masyarakat madani (civil society), • Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, • Perluasan akses partisipasi publik; • Pengembangan budaya politik kewargaan; • Penataan daerah otonom dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali; • Pengembangan kerja sama antar daerah • Peningkatan kapasitas pemimpin dan anggota DPRD sebagai optimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis, sehingga diperlukan peran aktif pers dan media informasi	Informatika	<p>Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi • Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika • Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi • Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika 	<p>Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi • Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika • Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi • Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika • Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika untuk Masyarakat • Peningkatan SDM Persandian dan Telekomunikasi • Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 	<p>Peningkatan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika • Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi • Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika • Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika untuk Masyarakat • Fasilitasi, Koordinasi dan Pengembangan Piranti Keras dan Lunak Sistem Informasi Daerah yang terintegrasi • Peningkatan perangkat Persandian dan Telekomunikasi Daerah • Peningkatan SDM Persandian dan Telekomunikasi • Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 	<p>Pemantapan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika • Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi • Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika • Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika untuk Masyarakat • Fasilitasi, Koordinasi dan Pengembangan Piranti Keras dan Lunak Sistem Informasi Daerah yang terintegrasi • Peningkatan perangkat Persandian dan Telekomunikasi Daerah • Peningkatan SDM Persandian dan Telekomunikasi • Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

No	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan	Bidang/ Urusan	Tahapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan			
				2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan pada sektor keamanan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Keamanan dan Ketertiban	<p>Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, • Pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta • Membangun masyarakat patuh hukum 	<p>Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan; • Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; • Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia • Peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; 	<p>Pemantapan bidang ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan; • Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; • Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia • Peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; • Peningkatan pemahaman demokrasi dan penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik • Peningkatan peran dan fungsi organisasi masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban 	<p>Pemantapan bidang ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan; • Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; • Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia • Peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; • Peningkatan pemahaman demokrasi dan penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik • Peningkatan peran dan fungsi organisasi masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban

Lampiran 2

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut
Tahun 2005-2008 dan Proyeksi Tahun 2009-2025
(Asumsi Inflasi 2010-2025 sebesar 6 persen)

INDIKATOR MAKRO KABUPATEN GARUT TAHUN 2005-2008 DAN PROYEKSI 2009-2025
(Proyeksi Moderat dengan Asumsi Inflasi 2010-2025 sebesar 6 persen)

INDIKATOR MAKRO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(Angka Tetap)	(Angka Tetap)	(Angka Tetap)	(Angka Tetap)						
1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	68.70	69.51	69.99	70.52	71.15	71.79	72.30	73.09	73.85	74.27
INSDEKS KESEHATAN	64.17	65.23	65.70	66.33	66.65	67.35	67.92	68.43	68.95	69.50
Angka Harapan Hidup (tahun)	63.50	64.14	64.42	64.80	64.99	65.41	65.75	66.06	66.37	66.70
Angka Kematian Bayi (Per Seribu Kelahiran Hidup)	54.83	53.79	52.77	52.42	51.65	50.89	50.62	50.03	49.45	48.76
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus kelahiran)	255.00	246.00	237.00	228.43	219.64	210.86	202.07	193.29	184.50	175.74
INSDEKS PENDIDIKAN	80.44	81.60	81.70	81.71	82.28	82.60	82.93	83.25	83.60	83.91
indeks melek huruf	98.00	98.86	98.89	98.89	99.07	99.12	99.18	99.22	99.30	99.32
Angka Melek Huruf (%)	98.00	98.86	98.89	98.89	99.07	99.12	99.18	99.22	99.30	99.32
Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	6.80	7.06	7.10	7.10	7.31	7.43	7.56	7.69	7.83	7.96
indeks rls	45.33	47.07	47.33	47.35	48.71	49.56	50.42	51.30	52.19	53.08
INSDEKS DAYA BELI	61.49	61.69	62.56	63.54	64.52	65.43	66.06	67.60	68.99	69.41
Kemampuan Daya Beli (000 Rp)	626.10	626.93	630.72	634.95	639.19	643.12	645.85	652.51	658.53	660.33
2. JUMLAH PENDUDUK	2,239,091	2,274,973	2,309,774	2,345,108	2,380,981	2,417,404	2,454,384	2,491,930	2,530,050	2,568,753
3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	1.58	1.60	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
4. JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa *)	386,100	434,481	435,460	428,396	423,188	420,743	417,561	413,694	409,893	406,492
Persentase Penduduk Miskin	17.24	19.10	18.85	18.27	17.77	17.40	17.01	16.60	16.20	15.82
5. Angka Kelahiran Pddk Prpuan Pernah Kawin(TFR)	2.19	2.18	2.14	2.11	2.09	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
6. JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA 10 TH +	799,481	839,688	886,746	890,740	908,370	914,492	918,889	924,475	929,916	939,804
7. KETENAGAKERJAAN										
Usia Kerja 15 Tahun Keatas	1,475,665	1,501,717	1,534,494	1,570,507	1,594,532	1,618,924	1,643,689	1,668,833	1,694,362	1,720,281
* Angkatan Kerja	902,870	905,326	911,309	918,596	921,456	924,326	927,204	930,091	932,987	933,788
* Pengangguran	50,726	49,671	49,829	50,134	50,091	49,242	48,408	47,587	46,781	45,982
* TPT	5.62	5.49	5.47	5.46	5.44	5.33	5.22	5.12	5.01	4.92
Usia Kerja 10 Tahun Keatas	1,712,348	1,748,466	1,784,487	1,822,092	1,849,965	1,878,265	1,906,997	1,936,169	1,965,788	1,995,859
* Angkatan Kerja	918,244	952,203	987,607	990,942	1,006,101	1,011,277	1,016,479	1,021,708	1,026,964	1,036,764
* Pengangguran	118,764	112,515	100,861	100,202	97,731	96,785	97,590	97,233	97,048	96,960
* TPT	12.93	11.82	10.21	10.11	9.71	9.57	9.60	9.52	9.45	9.35
8. PDRB BERLAKU (Juta rp)	13,697,884	15,890,281	17,715,224	20,360,837	22,823,083	25,477,894	28,505,060	31,952,757	35,778,707	39,969,965
9. PDRB KONSTAN '2000 (Juta rp)	8,768,410	9,128,808	9,563,128	10,011,296	10,484,034	11,041,086	11,653,714	12,323,806	13,018,331	13,720,141
INDEKS HARGA IMPLISIT	156.22	174.07	185.25	207.60	217.69	230.76	244.60	259.28	274.83	291.32
10. INFLASI (%)	20.83	8.44	7.72	12.07	4.86	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
11. KONSUMSI RUMAH TANGGA (JUTA Rp)	10,340,430	11,885,985	13,204,308	15,221,525	17,062,272	19,046,977	21,310,051	23,887,509	26,747,745	29,881,081
12. KONSUMSI PEMERINTAH (Juta Rp)	1,185,352	1,607,567	1,868,749	2,268,612	2,542,956	2,838,756	3,176,044	3,560,188	3,986,477	4,453,468
13. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	4.16	4.11	4.76	4.69	4.72	5.31	5.55	5.75	5.64	5.39
14. PDRB PERKAPITA (Rp) a.d.h. Berlaku	6,117,609	6,984,822	7,669,678	8,682,261	9,585,578	10,539,360	11,613,936	12,822,495	14,141,504	15,560,067
PDRB Perkapita a.d.h Konstan 2000	3,916,058	4,012,710	4,140,287	4,269,014	4,403,241	4,567,331	4,748,121	4,945,487	5,145,484	5,341,168
15. INVESTASI (Miliar)	1,983.70	2,293.70	2,462.37	2,761.77	3,002.88	3,419.23	3,825.48	4,288.18	4,801.63	5,364.11
16. LAJU INVESTASI (%)	10.43	15.63	7.35	12.16	8.73	13.86	11.88	12.10	11.97	11.71

Catatan: *) Tidak ada bencana alam, krisis, dan segala jenis yang menyebabkan guncangan perekonomian

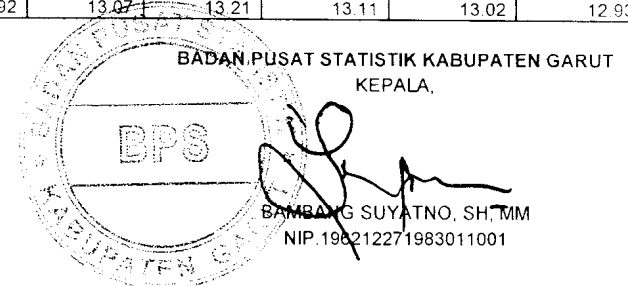
**) Asumsi Inflasi pada tahun 2010 - 2025 sebesar 6 persen pertahun

INDIKATOR MAKRO (LANJUTAN...)

INDIKATOR MAKRO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(ANGKA PROYEKSI)										
1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	75.49	76.37	77.25	78.13	79.03	79.94	80.88	81.83	82.78	83.74	84.68
INSDEKS KESEHATAN	71.34	72.16	72.98	73.81	74.63	75.46	76.28	77.10	77.93	78.75	79.57
Angka Harapan Hidup (tahun)	67.80	68.30	68.79	69.28	69.78	70.27	70.77	71.26	71.76	72.25	72.74
Angka Kematian Bayi (Per Seribu Kelahiran Hidup)	47.79	47.09	46.39	45.69	45.00	44.30	43.60	42.91	42.21	41.51	40.81
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kasus kelahiran)	166.94	158.15	149.37	140.58	131.80	123.01	114.23	105.44	96.66	87.87	79.09
INSDEKS PENDIDIKAN	84.23	84.56	84.88	85.21	85.54	85.88	86.21	86.55	86.88	87.22	87.56
indeks melek huruf	99.35	99.38	99.42	99.45	99.48	99.51	99.54	99.57	99.61	99.64	99.67
Angka Melek Huruf (%)	99.35	99.38	99.42	99.45	99.48	99.51	99.54	99.57	99.61	99.64	99.67
Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	8.10	8.23	8.37	8.51	8.65	8.79	8.93	9.07	9.22	9.36	9.50
indeks rls	53.98	54.90	55.81	56.74	57.67	58.60	59.54	60.49	61.44	62.39	63.35
INSDEKS DAYA BELI	70.90	72.40	73.89	75.37	76.90	78.49	80.14	81.85	83.55	85.23	86.91
Kemampuan Daya Beli (000 Rp)	666.79	673.28	679.73	686.12	692.77	699.66	706.80	714.18	721.52	728.82	736.09
2. JUMLAH PENDUDUK	2,608,048	2,647,944	2,688,451	2,729,577	2,771,332	2,813,726	2,856,769	2,900,470	2,944,839	2,989,888	3,035,625
3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
4. JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa *)	387,948	370,249	353,358	337,238	321,853	307,170	293,157	279,783	267,019	254,837	243,212
Persentase Penduduk Miskin	14.88	13.98	13.14	12.35	11.61	10.92	10.26	9.65	9.07	8.52	8.01
5. Angka Kelahiran Pddk Ppuan Pernah Kawin(TFR)	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
6. JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA 10 TH +	944,398	942,920	941,434	939,940	938,440	936,936	935,428	933,917	932,403	930,887	929,370
7. KETENAGAKERJAAN											
Usia Kerja 15 Tahun Keatas	1,746,597	1,773,315	1,800,442	1,827,984	1,855,948	1,884,339	1,913,164	1,942,430	1,972,144	2,002,313	2,032,943
* Angkatan Kerja	933,851	933,915	933,978	934,042	934,105	934,168	934,232	934,295	934,359	934,422	934,486
* Pengangguran	45,610.82	44,883.30	44,155.68	43,427.95	42,700.13	41,972.22	41,244.20	40,516.08	39,787.86	39,059.55	38,331.13
* TPT	4.88	4.81	4.73	4.65	4.57	4.49	4.41	4.34	4.26	4.18	4.10
Usia Kerja 10 Tahun Keatas	2,026,390	2,057,389	2,088,861	2,120,815	2,153,258	2,186,197	2,219,641	2,253,595	2,288,069	2,323,071	2,358,607
* Angkatan Kerja	1,031,571	1,026,405	1,021,264	1,016,149	1,011,059	1,005,995	1,000,957	995,943	990,955	985,992	981,053
* Pengangguran	87,173.83	83,484.30	79,830.02	76,208.81	72,619.02	69,059.35	65,528.79	62,026.51	58,551.87	55,104.33	51,683.47
* TPT	8.45	8.13	7.82	7.50	7.18	6.86	6.55	6.23	5.91	5.59	5.27
8. PDRB BERLAKU (Juta rp)	44,645,514	49,859,794	55,633,456	62,022,994	69,246,382	77,417,585	86,666,814	97,142,907	108,792,588	121,739,821	136,121,094
9. PDRB KONSTAN '2000 (Juta rp)	14,457,618	15,232,232	16,034,050	16,863,746	17,762,028	18,733,944	19,785,023	20,921,314	22,104,022	23,334,516	24,614,199
INDEKS HARGA IMPLISIT	308.80	327.33	346.97	367.79	389.86	413.25	438.04	464.33	492.18	521.72	553.02
10. INFLASI (%)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
11. KONSUMSI RUMAH TANGGA (JUTA Rp)	33,196,719	36,871,113	40,912,224	45,353,741	50,345,663	55,958,955	62,274,083	69,382,316	77,228,557	85,883,349	95,423,478
12. KONSUMSI PEMERINTAH (Juta Rp)	4,974,420	5,555,397	6,198,700	6,910,625	7,715,458	8,625,896	9,656,449	10,823,699	12,121,710	13,564,296	15,166,663
13. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	5.38	5.36	5.26	5.17	5.33	5.47	5.61	5.74	5.65	5.57	5.48
14. PDRB PERKAPITA (Rp) a.d.h. Berlaku	17,118,364	18,829,625	20,693,501	22,722,567	24,986,677	27,514,256	30,337,356	33,492,127	36,943,470	40,717,189	44,841,208
PDRB Perkapita a.d.h Konstan 2000	5,543,464	5,752,475	5,964,048	6,178,154	6,409,202	6,658,055	6,925,665	7,213,078	7,506,020	7,804,479	8,108,445
15. INVESTASI (Miliar)	6,111.42	6,893.45	7,766.61	8,747.45	9,863.86	11,138.10	12,593.47	14,256.90	16,126.30	18,225.92	20,582.76
16. LAJU INVESTASI (%)	13.93	12.80	12.70	12.60	12.76	12.92	13.07	13.21	13.11	13.02	12.93

Catatan: *) Tidak ada bencana alam, krisis, dan segala

**) Asumsi Inflasi pada tahun 2010 - 2025 seb



BAMBANG SUYATNO, SH, MM
NIP.196212271983011001